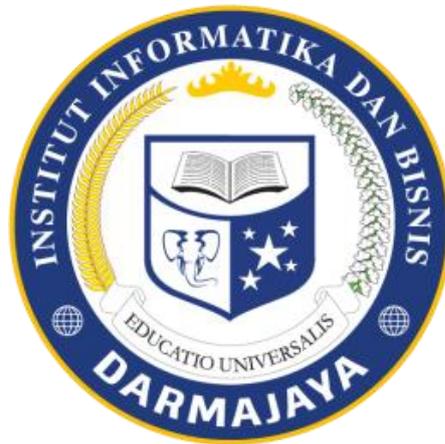


**PERAN STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM TINGKAT
KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* IMPLEMENTASI PSAK
BERBASIS IFRS INDONESIA
(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2015-2017)**

SKRIPSI



Disusun Oleh :

Nama : Rani Hersansi

NPM : 1512120079

**PROGRAM STUDI AKUNTASI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
INSTITUT INFORMATIKA DAN BISNIS DARMAJAYA
BANDAR LAMPUNG**

2019

PERNYATAAN



Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi atau karya pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka. Dan apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka sanggup menerima hukuman atau sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bandar Lampung, 5 Maret 2019



Rani Hersansi
NPM. 1512120079

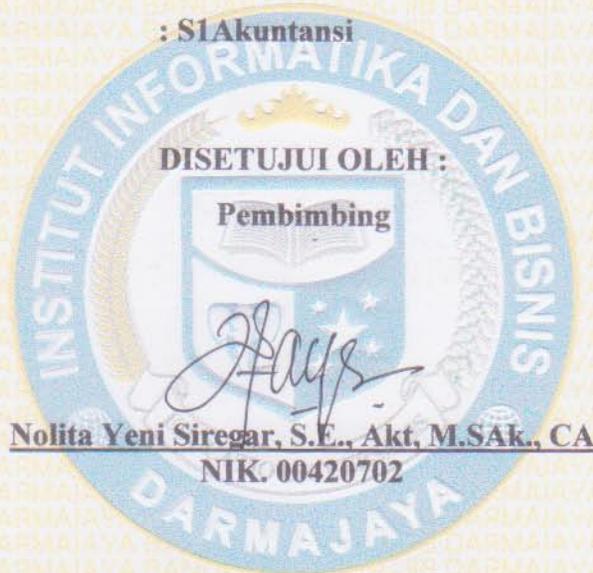
HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Peran Struktur *Corporate Governance* Dalam tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Implementasi PSAK Berbasis IFRS Indonesia

Nama Mahasiswa : Rani Hersansi

No. Pokok Mahasiswa : 1512120079

Program Studi : S1Akuntansi



Ketua Program Studi Akuntansi



HALAMAN PENGESAHAN

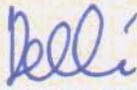
Telah diselenggarakan Sidang dengan Judul **PERAN STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE DALAM TINGKAT KEPATUHAN MANDATORY DISCLOSURE IMPLEMENTASI PSAK BERBASIS IFRS INDONESIA**, untuk memenuhi sebagai persyaratan akademik guna memperoleh gelar SARJANA EKONOMI, bagi mahasiswa :

Nama Mahasiswa : **RANI HERSANSI**

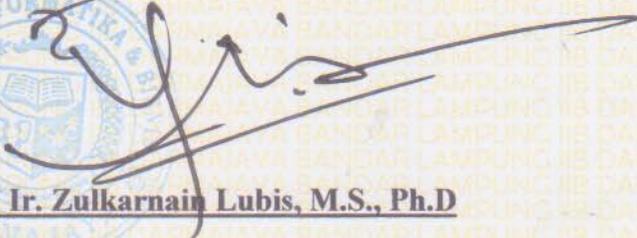
No. Pokok Mahasiswa : 1512120079

Program Studi : SI Akuntansi

Dengan telah dinyatakan **LULUS** oleh Dewan Penguji yang terdiri dari :

<u>Nama</u>	<u>Status</u>	<u>Tanda Tangan</u>
1. Delli Maria.,S.E.,M.Sc	- Ketua Sidang	
2. Yaumil Khoiriyah., S.E., M.Ak	- Anggota	

Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis IIB Darmajaya


Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.S., Ph.D

NIK. 14580718

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 05 Maret 2019

RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

- a. Nama : Rani Hersansi
- b. NPM : 1512120079
- c. Tempat, Tanggal Lahir : Seputih Jaya, 07 November 1997
- d. Agama : Islam
- e. Alamat : Perumnas Seputih Jaya Blok A4 No.5
- f. Suku : Palembang
- g. Kewarganegaraan : Indonesia
- h. E-mail : ranihersansi7@gmail.com
- i. HP : 0812-1862-3692

2. Riwayat Pendidikan

- a. Sekolah Dasar : SD Negeri 3 Bandar Jaya
- b. Sekolah Menengah Pertama : SMP Negeri 3 Terbanggi Besar
- c. Sekolah Menengah Atas : SMA Negeri 1 Terbanggi Besar

Dengan ini saya menyatakan bahwa semua keterangan yang saya sampaikan di atas adalah benar.

Yang Menyatakan

Bandar Lampung, 5 Maret 2019

Rani Hersansi
NPM. 1512120079

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini untuk papah, mamahku dan kakakku yang pada akhirnya aku mampu menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala doa dan dukungannya papah dan mamah selama ini yang tidak pernah berhenti dan lelah, dan juga terimakasih telah menjadi penyemangatku untuk segera menyelesaikan masa perkuliahan. Terimakasih atas kasih sayang yang begitu berlimpah yang papah, mamah dan kakakku berikan untukku

...

Terimakasih juga untuk keluarga besarku, terimakasih untuk semangat, motivasi dan limpahan kasih sayang dari keluarga besar ini. Yang selalu memberikan semangat bahwa aku mampu menyelesaikan skripsiku tepat pada waktunya

...

Terimakasih untuk sahabat-sahabat ku, pacar ku yang selalu ada di setiap kesulitanku terimakasih untuk tawanya, pelajarannya, hiburannya, dan kegilaan lainnya, terimakasih untuk selalu mengajarkan dan menyemangati agar dapat menyelesaikan masa perkuliahan bersama-sama

Terimakasih juga untuk teman-teman lainnya yang tidak bisa ku sebutkan satu persatu, terimakasih atas torehan senyum dan cerita yang kalian berikan

...

MOTTO

“Yakin adalah kunci jawaban dari segala permasalahan.

Dengan bermodal yakin merupakan obat mujarab penumbuh semangat
hidup”

(Penulis)

“ Barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan berhasil”

“Tidak ada hal yang sia-sia dalam belajar karena ilmu akan bermanfaat
pada waktunya”

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya
bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari
sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan
hanya kepada tuhanmulah engkau berharap.” (Q.S. Al-Insyirah, 6-8)

**PERAN STRUKTUR *CORPORATE GOVERNANCE* DALAM TINGKAT
KEPATUHAN *MANDATORY DISCLOSURE* IMPLEMENTASI PSAK
BERBASIS IFRS INDONESIA**

**(Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun
2015-2017)**

Oleh

Rani Hersansi

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan secara empiris peran struktur *corporate governance* dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* implementasi PSAK berbasis IFRS Indonesia. Variabel dalam penelitian ini meliputi jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah anggota komite audit, jumlah anggota dewan direksi dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini menggunakan 3 variabel kontrol yaitu profitabilitas, leverage dan likuiditas. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan periode pengamatan dari tahun 2015-2017. Sampel dalam penelitian ini berjumlah 51 perusahaan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Metode analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan regresi linier berganda, SPSS versi 20. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah dewan komisaris wanita, jumlah berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Sedangkan, latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Untuk variabel kontrol profitabilitas, leverage, dan likuiditas memiliki pengaruh terhadap *Mandatory Disclosure*.

Kata kunci : **Struktur *Corporate Governance* , Kepatuhan *Mandatory Disclosure*.**

**ROLE OF CORPORATE GOVERNANCE STRUCTURE ON LEVEL OF
MANDATORY COMPLIANCE DISCLOSURE IN IFRS-BASED IFAS
IMPLEMENTATION**

**(An Empirical Study on Manufacturing Companies Indexed in Indonesia
Stock Exchange in the Period of 2015-2017)**

By

Rani Hersansi

ABSTRACT

The objective of this research was proving empirically the role of the corporate governance structure on the level of mandatory compliance disclosure in the IFRS-based IFAS implementation. The variables used in this research were the number of the board of commissioner member, the proportion of independent commissioners, the background of principal commissioner's education, the proportion of female commissioners, the number of audit committee members, the number of board of director members, and the managerial ownership. Moreover, the control variables were the profitability, the leverage, and the liquidity. The subject of this research was the manufacturing companies indexed in Indonesia Stock Exchange in the period of 2015-2017. The sampling technique used in his research was the purposive sampling technique. The number of samples used in this research was 51 companies. The data analyzing techniques used in this research were through the descriptive statistical analysis and multiple linear regression analysis. The analytical tool used in this research was SPSS version 20. The result of this research showed that the number of the board of commissioner member, the proportion of independent commissioners, and the number of female commissioners had a significant effect on the mandatory compliance disclosure; however, the background of principal commissioner's education had no significant effect on the mandatory compliance disclosure. Moreover, the profitability, the leverage, and the liquidity had an effect on the mandatory compliance disclosure.

Keywords: Corporate Governance Structure, Mandatory Compliance Disclosure



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Tuhan YME, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul “**Peran Struktur Corporate Governance Dalam tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Implementasi PSAK Berbasis IFRS Indonesia**”. Penulisan Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Darmajaya jurusan akuntansi di perguruan tinggi IIB Darmajaya Bandar Lampung.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini tidak akan berhasil disusun dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. **Bapak Ir. Firmansyah Y. Alfian, MBA., MSc** selaku Rektor Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
2. **Bapak Dr. RZ. Abdul Aziz, ST., MT** selaku Wakil Rektor I Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
3. **Bapak Ronny Nazar, SE., MM** selaku Wakil Rektor II Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
4. **Bapak Muprihan Thaib, S.Sos.,MM** selaku Wakil Rektor III Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
5. **Bapak Prof. Zulkarnain Lubis, MS., Ph.D** selaku Wakil Rektor IV sekaligus Dekan Fakultas Ilmu Ekonomi dan Bisnis Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya.
6. **Ibu Anik Irawati, S.E., M.Sc** selaku Ketua Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya.
7. **Ibu Rieka Ramadhaniah., S.E., M.Ec.Dev., CPA** selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi IIB Darmajaya.
8. **Ibu Nolita Yeni Siregar, S.E., Akt, M.S.Ak., CA** selaku dosen pembimbing yang dengan sabar dan ikhlas membantu serta mengarahkan saya dalam menyusun Skripsi ini sehingga dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

9. Bapak dan ibu Dosen Pengajar terutama jurusan akuntansi yang telah membagi Ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat kepada penulis.
10. Papah, mamah, kakak dan keluarga besarku tersayang yang selalu mendukung dan memberikan pengertian baik moril maupun materil yang tidak terhitung sampai selesainya pendidikanku.
11. Muhammad Yasfin yang selalu menemani saya serta memberi dukungan dan semangat dalam mengerjakan skripsi ini.
12. Sahabat-sahabatku Vinda,Zenia, Jimmi, Regita, Pika, Riska yang telah memberi semangat dan membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuanganku dari semester 1 Sheni, Rani, dan Kiki .
14. Rekan-rekan seangkatan Tahun 2015 dari jurusan S1 Akuntansi yang tidak dapat disebutkan satu-satu disini, terimakasih atas bantuan kalian jika aku sedang mengalami kesusahan, dan juga dukungan do'a serta pengertiannya selama ini.
15. Semoga Tuhan YME memberikan Rahmat-Nya atas semua bantuan yang telah diberikan selama penyusunan Skripsi ini. Semoga Skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca.

Bandar Lampung, 5 Maret 2019

Yang Menyatakan,

Rani Hersansi

NPM. 1512120079

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
RIWAYAT HIDUP	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
ABSTRACK	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup Penelitian.....	5
1.3 Rumusan Masalah	6
1.4 Tujuan Penelitian	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Sistematika Penulisan	7

BAB II LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan	12
2.2 <i>Mandatory Disclosure</i>	14
2.3 Struktur <i>Corporate Governance</i>	15
2.4 Penelitian Terdahulu	20
2.5 Kerangka Pemikiran	22
2.6 Bangunan Hipotesis	23

2.6.1	Jumlah Anggota Dewan Komisaris.....	23
2.6.2	Proporsi Komisaris Independen	23
2.6.3	Latar Belakang Komisaris Utama.....	24
2.6.4	Proporsi Komisaris Wanita	25
2.6.5	Jumlah Komite Audit	25
2.6.6	Jumlah Dewan Direksi.....	26
2.6.7	Kepemilikan Manajerial.....	27

BAB III METODE PENELITIAN

3.1	Jenis dan Sumber Data	28
3.2	Metode Pengumpulan Data	28
3.3	Populasi Dan sampel Penelitian	29
3.4	Definisi Operasional Variabel.....	30
3.4.1.	Variabel Dependen.....	30
3.4.2.	Variabel Independen	31
3.4.2.1.	Jumlah Anggota Dewan Komisaris.....	31
3.4.2.2.	Proporsi Komisaris Independen.....	31
3.4.2.3.	Latar Bekang Komisaris Utama.....	32
3.4.2.4.	Proporsi Komisaris Wanita.....	32
3.4.2.5.	Jumlah Anggota Komite Audit.....	32
3.4.2.6.	Jumlah Anggota Dewan Direksi.....	32
3.4.2.7.	Kepemilikan Manajerial.....	33
3.4.3	Variabel Kontrol.....	33
3.4.3.1	Profitabilitas	33
3.4.3.2	Leverage	34
3.4.3.3	Likuiditas	34
3.5	Metode Analisis Data	34
3.6	Statistik Deskriptif	34
3.7	Uji Asumsi Klasik	35
3.7.1	Uji Normalitas	34
3.7.2	Uji Multikolinearitas	35
3.7.3	Uji Heteroskedastisitas	35
3.7.4	Uji Autokorelasi	35

3.8 Pengujian Hipotesis.....	36
3.8.1 Analisis Regresi Linear Berganda	36
3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R ²)	37
3.8.3 Uji Statistik F	38
3.8.4 Uji Statistik T	38

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis Data.....	38
4.1.1 Data dan Sampel.....	40
4.1.2 Statistik Deskriptif	
4.2 Asumsi Klasik.....	42
4.2.1 Uji Normalitas Data.....	42
4.2.2 Uji Multikolinearitas.....	43
4.2.3 Uji Autokorelasi.....	44
4.2.4 Uji Heteroskedastisitas.	45
4.3 Hasil Pengujian Hipotesis	46
4.3.1 Uji Regresi Berganda	46
4.3.2 Uji Koefisien Determinasi R^2	49
4.3.3 Uji Statistik F/Kelayakan Model.....	50
4.3.4 Uji Statistik T	51
4.4 Pembahasan.....	50
4.4.1 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris	53
4.4.2 Pengaruh Proporsi Komisaris Independen	54
4.4.3 Pengaruh Latar Pendidikan Komisaris Utama	55
4.4.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Utama	56
4.4.5 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit.....	57
4.4.6 Pengaruh Jumlah Dewan Direksi.....	58
4.4.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial.....	59
4.4.8 Pengaruh Profitabilitas.....	60
4.4.9 Pengaruh Leverage.....	61
4.4.10 Pengaruh Likuiditas	62

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan 63
5.2 Keterbatasan.....63
5.3 Saran..... 64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	21
Tabel 2.1 Kerangka Pemikiran	22
Tabel 4.1 Tahapan seleksi sampel penelitian	39
Tabel 4.2 Hasil Uji Statistik Deskriptif	40
Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas.....	43
Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas	44
Tabel 4.5 Hasil Uji Autokorelasi	45
Tabel 4.6 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	46
Tabel 4.7 Hasil Uji Model Regresi Linear Berganda	47
Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi	50
Tabel 4.9 Hasil Uji statistik f.....	51
Tabel 4.10 Hasil Uji Statistik t	52

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	22

PDAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A Perusahaan Sampel Penelitian

Lampiran B Hasil Statistik Deskriptif

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dampak perekonomian dari penerapan IFRS pada akhir-akhir ini semakin disorotin banyak dunia. Penerapan IFRS dapat memberikan manfaat ekonomi yang sangat besar, sebagai cara untuk memudahkan pemahaman atas laporan keuangan secara internasional dimana pemanfaatannya tidak hanya untuk para pelaku usaha yang bergerak dalam perusahaan *go public* namun manfaat yang diterima juga diperoleh para pengguna jasa keuangan. Selain itu, penerapan standar ini dapat meningkatkan arus investasi global melalui transparansi (Fajariansyah, 2013). Saat ini di Indonesia berlaku Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per efektif 1 Januari 2015 yang secara substansial telah berkonvergensi dengan IFRS yang berlaku efektif per 1 Januari 2014. (IAI, 2016).

Bagi para investor, laporan tahunan (*annual report*) merupakan sumber informasi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di dalam pasar modal. Selain itu laporan tahunan perusahaan juga dijadikan sebagai jendela bagi pihak-pihak diluar manajemen untuk mengetahui kinerja perusahaan selama satu tahun yang kemudian digunakan untuk memprediksi masa depan perusahaan tersebut. Pasar modal yang efisien harus dapat memberikan perlindungan kepada investor publik dari praktek bisnis yang tidak sehat, tidak jujur, dan bentuk-bentuk manipulasi lainnya. Laporan tahunan menjadi salah satu media untuk menyampaikan informasi mengenai posisi keuangan perusahaan dan informasi perusahaan lainnya dalam satu periode kepada pihak eksternal atau investor. Para investor menggunakan informasi yang ada pada laporan tahunan sebagai dasar pertimbangan mereka dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal dan sebagai bentuk pertanggungjawaban manajemen atas sumberdaya yang telah dipercayakan kepada mereka (Budiasih, 2016).

Laporan tahunan harus diungkapkan dengan lengkap dan sebaik – baiknya agar mudah dipahami oleh para pengguna laporan keuangan perusahaan sehingga mereka tidak salah dalam menginterpretasikan informasi keuangan perusahaan. Dalam pembuatan laporan tahunan tidak lepas dari penelitian mengenai kelengkapan pengungkapan (*disclosure*) dan faktor – faktor yang mempengaruhi kepatuhan dalam pengungkapan informasi keuangan perusahaan. Karakteristik dari IFRS adalah mensyaratkan perusahaan untuk melakukan pengungkapan yang tinggi dengan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi perusahaan. Dengan persyaratan pengungkapan yang tinggi, perusahaan akan memberikan informasi secara penuh mengenai aktivitas – aktivitas perusahaan yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan. Pengungkapan dalam laporan tahunan dibedakan menjadi dua yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). (Rahmawati, 2016).

Mandatory disclosure bertujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi pengguna laporan keuangan, memastikan pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Utami, 2012), memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan sehingga investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis (Al Akra et al., 2014). *Mandatory disclosure* sangatlah penting, karena semakin luas atau semakin banyak laporan keuangan yang diungkapkan, maka perusahaan akan dipandang berkualitas baik. Perusahaan harus mampu memenuhi kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh semua pihak untuk dapat mencapai target dan mempertahankan kesuksesan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan harus menyajikan laporan keuangan yang relevan untuk membuat keputusan dengan adanya informasi yang diungkapkan. Kebutuhan pihak eksternal akan informasi keuangan perusahaan membuat tingkat kepentingan informasi keuangan tersebut meningkat.

Pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) adalah pengungkapan minimum mengenai informasi yang harus ada atau harus disampaikan dalam laporan tahunan perusahaan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang. Luas pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) sangat penting dikarenakan semakin luas informasi laporan keuangan yang dilaporkan maka, perusahaan akan dipandang memiliki kualitas yang baik (Rahmawati, 2016). Tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dalam pengambilan keputusan. Menurut Hikmah (2014) luas pengungkapan laporan tahunan yang diberikan perusahaan sangat penting bagi pihak eksternal untuk menghindari asimetri informasi, dimana pihak internal memiliki informasi yang lebih banyak dibandingkan dengan informasi yang didapatkan oleh pihak eksternal. Pengungkapan dan transparan dalam laporan keuangan akan menambah nilai bagi stakeholders. Jika tidak ada pengungkapan yang memadai, stakeholders tidak dapat meyakini bahwa kegiatan pengelolaan perusahaan oleh manajemen dilakukan dengan cara bijaksana dan hati-hati untuk kepentingan mereka.

Regulasi informasi di pasar modal, diatur oleh peraturan yang dikeluarkan oleh otoritas yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu BAPEPAM (Badan Pengawas Pasar Modal)-LK. Berdasarkan UU Pasar Modal Pasal 69 Ayat 2, menyatakan bahwa BAPEPAM berwenang untuk menetapkan ketentuan akuntansi di bidang pasar modal. Dengan demikian perusahaan yang statusnya telah *go public*, wajib menaati peraturan yang dikeluarkan BAPEPAM, terutama berkaitan dengan keterbukaan di bidang ekonomi melalui pengungkapan laporan keuangan, sebagai salah satu pilar penting dari prinsip *good corporate governance* demi melindungi kepentingan investor. (Pratiwi,2013).

Mandatory disclosure di Indonesia telah diatur oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-347/BL/2012 tentang penyajian pengungkapan laporan keuangan emiten atau perusahaan public dan pengungkapan wajib secara terperinci juga diatur dalam SAK Konvergensi IFRS. *Mandatory disclosure* mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang. Namun, nyatanya penerapan dari peraturan tersebut belum mampu menjamin praktik pengungkapan yang tinggi. Di Indonesia, pada tanggal 13 maret tahun 2017 terjadi kasus *mark-up* laporan keuangan PT Kimia Farma. Tbk yang *overstated* serta kasus PT Petromine Energy Trading (anak perusahaan PT Bakrie & Brothers, Tbk) yang tidak mencantumkan pendapatan dari jasa penyediaan bahan bakar kepada AKR Corporindo hingga Bakrie & Brothers mendapatkan sanksi sebesar Rp 4.000 miliar dari BAPEPAM-LK. Kedua kasus tersebut membuktikan adanya kasus pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur di pasar modal bahwa transparansi dan kepatuhan terhadap pengungkapan wajib masih kurang. Hal ini sejalan dengan Teori Keagenan yang menyatakan bahwa manajemen akan berusaha memaksimalkan laba untuk kepentingan mereka sendiri. Mekanisme corporate governance juga mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan wajib. Dari kasus yang terjadi di Indonesia pada PT Kimia Farma Tbk dan PT Petromine Energy Trading mengindikasikan adanya system tata kelola perusahaan yang buruk dalam memonitor dan mengelola perusahaan. (www.selasar.com)

Good Corporate Governance (GCG) diperlukan untuk mendorong terciptanya transparency, responsibility, fairness dan accountability yang menjadi hal penting untuk dilaksanakan mengingat seringnya terjadi konflik kepentingan antara pemegang saham atau komisaris dan para direktur dalam pengambilan keputusan. Terdapat dua mekanisme untuk menyamakan perbedaan kepentingan antara pemegang saham dan manajer dalam rangka penerapan corporate governance, yaitu mekanisme internal perusahaan dan mekanisme eksternal. *Forum For*

Corporate Governance in Indonesian (FCGI) mendefinisikan corporate governance sebagai seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan intern dan ekstern lainnya sehubungan dengan hak-hak dan kewajiban mereka yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. (Silviana dan Budiharta, 2017).

Dewan komisaris berfungsi untuk melakukan pengawasan terhadap manajerial. Jumlah dewan komisaris yang banyak, akan meminimalkan tingkat kecurangan dalam pengungkapan informasi. Dewan komisaris adalah unsur internal balance yang penting untuk melakukan pengawasan atas pengelolaan perusahaan. Menurut Sutedi (2012) tugas komisaris adalah mengawasi kebijaksanaan direksi dalam menjalankan perusahaan memberikan nasihat kepada direksi. Berkaitan dengan peran dewan komisaris, Kenneth (2010) berpendapat bahwa peran pengawasan dewan komisaris akan melemah jika komisaris berasal dari pemegang saham mayoritas dan apabila pengaruh direksi yang terlalu kuat. Maka dibutuhkan komisaris independen yang duduk dalam jajaran pengurus perseroan. Semakin tinggi proporsi komisaris independen, maka praktek pengungkapan akan semakin baik. Keberadaan komisaris independen akan memberikan *shock therapy* kepada pengelola perusahaan untuk melaksanakan tata kelola perusahaan sebaik mungkin termasuk melakukan pengungkapan yang baik. Tugas utama dewan komisaris adalah menjamin pelaksanaan strategis, mengawasi manajemen, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Poulan (2015) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh pada mandatory disclosure namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Siagian (2012) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan ke arah negatif terhadap mandatory disclosure.

Keberadaan komisaris independen sangat diperlukan, komisaris independen dalam praktiknya merupakan anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya, pemegang saham pengendali, serta

bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Menurut Suhardjanto (2014) independent director lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan daripada non-independent director karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Menurut Chairina (2015) proporsi komisaris independen berpengaruh pada tingkat kepatuhan mandatory disclosure.

KNKG (2006) mengungkapkan bahwa tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, diharapkan koordinasi dewan komisaris menjadi lebih efektif. Suhardjanto dan Afni (2009) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama akan mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi. Salah satu keputusan yang dibuat oleh dewan direksi adalah keputusan tentang *mandatory disclosure* yang akan dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* dalam *annual report* perusahaan. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib.

Menurut Adams dan Ferreira (2004) komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka. Komisaris wanita juga akan meningkatkan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan pria (Kusumastuti et al., 2007). Penelitian

Feijoo et al. (2012) di Australia, Jepang dan UK menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR).

Menurut Sutedi (2012) komite audit harus dapat memastikan bahwa perusahaan telah melaksanakan dan mematuhi semua peraturan hukum serta memastikan perusahaan telah menjalankan usahanya secara etis dan bermoral. Bapepam LK mewajibkan setiap perusahaan memiliki minimal dua orang komite audit yang akan mengawasi proses pengungkapan. Jadi semakin banyak komite audit maka pengawasan terhadap pengungkapan semakin baik sehingga pengungkapan akan semakin baik pula. Hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu unsur yang independen untuk mengawasi pihak-pihak yang akan melakukan pengungkapan. Jumlah anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Menurut Suhardjanto (2014) komite audit dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun. Menurut Suhardjanto (2014) jumlah rapat komite audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan mandatory disclosure.

Dewan direksi memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap perusahaan. Segala aktivitas yang terjadi pada perusahaan merupakan tanggung jawab dewan direksi. Banyaknya jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan mandatory disclosure pada perusahaan tersebut juga tinggi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diyah (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Penelitian selanjutnya yaitu mengenai pengaruh dari variabel jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Menurut hasil penelitian dari Wardani et al, (2012) menyatakan hasil tidak signifikan. Hasil ini didapatkan karena perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia hanya sekedar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga jumlah anggota dewan direksi tidak

memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Pengaruh signifikan ini memiliki alasan bahwa dewan direksi dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan termasuk jika terjadi penyimpangan.

Kepemilikan manajerial merupakan persentase saham yang dimiliki oleh manajer dan direktur perusahaan pada akhir tahun untuk masing-masing periode pengamatan. Dengan adanya kepemilikan saham oleh pihak manajemen akan menimbulkan suatu pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Hal tersebut dipertegas pula dengan adanya kepemilikan manajerial maka manajemen akan bertindak layaknya pemegang saham dan akan melakukan praktek pengelolaan perusahaan yang akan meningkatkan nilai pemegang saham (Alvionita dan Taqwa, 2015). Menurut Fauziah (2015) kepemilikan manajerial berpengaruh pada tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Kepemilikan manajerial diartikan sebagai saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan (Diyah, 2015). Semakin besar tingkat kepemilikan manajerial yang ada pada suatu perusahaan, hal tersebut menandakan bahwa kinerja perusahaan tersebut mengalami peningkatan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari Prawinandi dkk. (2012) perbedaan dengan penelitian sebelumnya terletak pada penambahan variabel Independen Kepemilikan manajerial yang berasal dari penelitian Utami dkk. (2012) dan diduga berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dalam penelitian sebelumnya menggunakan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada Tahun 2012-2013, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2017. Berdasarkan uraian tersebut, maka judul penelitian ini adalah **“Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Implementasi PSAK berbasis IFRS”**.

1.2 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah pengujian peran struktur *corporate governance* dalam tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* implementasi PSAK berbasis IFRS. Dalam penelitian ini menggunakan objek perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

1.3 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Apakah jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?
- b. Apakah proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?
- c. Apakah latar belakang pendidikan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?
- d. Apakah proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?
- e. Apakah jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?
- f. Apakah jumlah anggota dewan direksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?
- g. Apakah kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukan penelitian ini adalah :

- a. Untuk membuktikan secara empiris struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan jumlah anggota dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib implementasi PSAK berbasis IFRS.
- b. Untuk membuktikan secara empiris struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan proporsi komisaris independen terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib implementasi PSAK berbasis IFRS.

- c. Untuk membuktikan secara empiris struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan latar belakang pendidikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib implementasi PSAK berbasis IFRS.
- d. Untuk membuktikan secara empiris struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan jumlah komisaris wanita terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib implementasi PSAK berbasis IFRS.
- e. Untuk membuktikan secara empiris struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan jumlah komite audit terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib implementasi PSAK berbasis IFRS.
- f. Untuk membuktikan secara empiris struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib implementasi PSAK berbasis IFRS.
- g. Untuk membuktikan secara empiris struktur *corporate governance* (CG) yang diukur dengan kepemilikan manajerial terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib implementasi PSAK berbasis IFRS.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah diharapkan dapat sebagai berikut :

- a. Bagi perusahaan jasa yang telah *go public*, penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi manajemen mengenai mekanisme GCG kaitannya dengan tingkat kepatuhan pengungkapan.
- b. Bagi investor, hasil penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan pengungkapan dalam laporan keuangan tahunan kaitannya dalam pengambilan keputusan ekonomi.
- c. Bagi pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak terkait, penelitian dapat digunakan sebagai pendorong untuk menetapkan kebijakan ataupun standar pengungkapan wajib yang lebih baik.
- d. Bagi peneliti lain, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai struktur *corporate governance* yang mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penulisan laporan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini tercantum latar belakang, ruang lingkup permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

b. BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini memuat tentang teori-teori yang mendukung penelitian yang akan dilakukan oleh penulis/peneliti. Apabila penelitian memerlukan analisa statistika maka pada bab ini dicantumkan juga teori statistika yang digunakan dalam hipotesis (bila diperlukan).

c. BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi metode-metode pendekatan penyelesaian permasalahan yang dinyatakan dalam perumusan masalah.

d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini, mahasiswa mendemonstrasikan pengetahuan akademis yang dimiliki dalam ketajaman daya pikirnya dalam menganalisis persoalan yang dibahasnya, dengan berpedoman pada teori-teori yang dikemukakan pada Bab II. Mahasiswa diharapkan dapat mengemukakan suatu gagasan/rancangan/model/alat/teori baru untuk memecahkan masalah yang dibahas sesuai dengan tujuan penelitian.

e. BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Dalam bab ini menguraikan kesimpulan serta memberi saran sebagai hasil pemikiran penelitian atas keterbasan penelitian yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori Agensi

Agency Theory yang diungkapkan oleh Jensen and Meckling (1976) merupakan teori yang menjelaskan mengenai seberapa penting adanya pemisahan kepemilikan dalam pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Pemisahan tersebut dapat memberikan keuntungan kepada pemegang saham (principal) dalam mendapatkan jumlah keuntungan yang maksimal dengan biaya yang efisien. Manajemen perusahaan memiliki peran dalam menjalankan operasi perusahaan dan untuk memaksimalkan laba yang didapatkan, sedangkan pemegang saham hanya melakukan kontrol atas pengelolaan perusahaan untuk mengetahui apakah agent bekerja untuk memenuhi kepentingan perusahaan atau kepentingan pribadi (Adrian, 2012). Adanya pemisahan kepemilikan tersebut tidak hanya membawa dampak positif bagi principal maupun agent, tetapi juga membawa dampak negatif. Dampak negatifnya yaitu manajemen perusahaan memiliki kekuasaan yang lebih untuk mengambil keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan untuk kepentingan pribadinya. Hal tersebut dapat terjadi karena manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi-informasi yang ada pada perusahaan yang tidak diketahui oleh pemegang saham. Selain itu, pemisahan kepemilikan juga membawa dampak pada kurangnya tingkat keterbukaan atau transparansi pada proses penggunaan dana yang ditanamkan oleh pemegang saham kepada perusahaan

Menurut Herawaty (2008), *corporate governance* yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberi keyakinan kepada investor bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang mereka investasikan. Tata kelola perusahaan didefinisikan sebagai sistem *checks and balances*, baik internal maupun eksternal perusahaan, yang memastikan bahwa perusahaan melaksanakan akuntabilitas mereka kepada semua pemangku kepentingan mereka dan bertindak dalam cara yang bertanggungjawab

secara sosial dalam semua bidang kegiatan bisnis mereka (Solomon, 2010). Pemisahan kepemilikan antara *principal* dengan agen cenderung akan menimbulkan konflik keagenan. Sama halnya dengan investor dan manajemen perusahaan. Manajemen harus dapat meyakinkan investor bahwa pihaknya tidak akan menyalahgunakan dana yang telah diinvestasikan oleh investor. Oleh karena itu, manajemen perusahaan melakukan pengungkapan informasi kinerja manajemen dalam laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban kepada investor. Penggunaan teori agensi relevan untuk penelitian ini karena teori agensi menganggap bahwa seseorang memiliki banyak peran dalam organisasi. Selanjutnya teori agensi berasumsi bahwa pandangan kontraktual dari perilaku manusia dapat memberikan ramalan atau gambaran tentang konsekuensi logis secara tepat.

Manajemen perusahaan sebagai pengelola harus dapat bertanggung jawab kepada investor atau pemilik perusahaan dengan memberikan laporan secara periodik berupa laporan keuangan sebagai penilaian kinerjanya selama periode yang sesuai dengan laporan keuangan tersebut. Namun, hubungan keagenan ini terkadang menimbulkan masalah yang dikarenakan agen atau manajemen perusahaan lebih mengetahui informasi internal serta prospek perusahaan pada perusahaan di masa mendatang dibandingkan dengan prinsipal atau investor. Hal ini dapat mengakibatkan konflik yang disebut dengan konflik kepentingan, dimana investor menginginkan dividen yang cepat dan berjumlah besar atas kegiatan investasi yang dilakukan dalam perusahaan, sedangkan manajemen perusahaan menginginkan gaji atau kompensasi yang besar juga.

Dampak negatif yang ditimbulkan akibat pemisahan kepemilikan tersebut dapat diminimalisir oleh perusahaan dengan cara melakukan penerapan *corporate governance*. *Corporate Governance* dapat membuat manajemen perusahaan untuk mengungkapkan semua informasi-informasi penting mengenai perusahaan, sehingga mempermudah pemegang saham dalam melakukan kontrol atas perusahaan. Menurut Adrian (2012), perusahaan yang menerapkan sistem

corporate governance dengan baik maka secara tidak langsung juga memberi keyakinan kepada pemegang saham atas investasi yang dilakukannya. Penerapan sistem corporate governance juga membantu perusahaan untuk meningkatkan pertumbuhan yang ada pada perusahaannya secara efisien.

2.2 *Mandatory Disclosure*

Secara umum, pengertian disclosure adalah pengungkapan atau pemberian informasi kepada masyarakat secara publik. Informasi yang diungkapkan pada laporan keuangan dikelompokkan menjadi dua yaitu *mandatory disclosure* (pengungkapan wajib) dan *voluntary disclosure* (pengungkapan sukarela). Mandatory disclosure merupakan suatu pengungkapan informasi yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan yang didasarkan pada peraturan atau standar tertentu terhadap investor (Sutiyok dan Rahmawati, 2016). Selain itu, investor dapat menentukan kesempatan pertumbuhan jangka panjang dan memperkirakan aliran kas keluar untuk suatu bisnis agar memberikan gambaran yang lebih jelas tentang kesehatan keuangan perusahaan dan menghitung beban masa depan (Al-Akra dan Ali, 2012). Mandatory disclosure merupakan pengungkapan informasi yang harus atau wajib diungkapkan oleh perusahaan karena telah diisyaratkan standar akuntansi dan peraturan yang berlaku. Ketaatan perusahaan terkait dengan mandatory disclosure tertuang dalam peraturan yang diterbitkan oleh BAPEPAM-LK No. VIII.G.7 tahun 2012. Sedangkan voluntary disclosure merupakan pengungkapan yang tidak diharuskan oleh peraturan atau bersifat sukarela sehingga jenis informasi yang diungkapkan dapat dipilih secara bebas oleh perusahaan.

Tujuan mandatory disclosure adalah agar dapat mencukupi kebutuhan informasi untuk para pengguna laporan tahunan dan untuk memastikan bahwa pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum serta standar akuntansi yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012). Perusahaan dapat menyembunyikan informasi penting yang seharusnya diungkapkan apabila peraturan tentang pengungkapan wajib tersebut tidak ada. Sehingga peraturan tentang pengungkapan wajib pada

laporan keuangan perusahaan sangatlah dibutuhkan. Pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela telah diatur dan ditetapkan dalam standar akuntansi internasional yaitu International Financial Reporting Standards (IFRS). Penerapan IFRS adalah untuk menyesuaikan dan menyelaraskan standar akuntansi yang berlaku pada suatu negara yang diperlukan untuk memudahkan pemahaman laporan keuangan secara internasional. Mandatory disclosure mengacu pada informasi yang harus diungkapkan sebagai konsekuensi dari adanya ketentuan perundang-undangan, pasar saham, komisi bursa saham, atau peraturan akuntansi dari pihak yang berwenang.

Mandatory disclosure adalah hal yang sangat penting bagi perusahaan manufaktur yang semakin berkembang pesat seiring dengan tuntutan global agar perusahaan lebih meningkatkan kualitas informasi keuangan. Perlunya peraturan mengenai mandatory disclosures pada laporan keuangan guna melindungi stakeholder yang memiliki kepentingan, sebab tanpa adanya peraturan ini dapat memberikan celah bagi perusahaan untuk menyembunyikan informasi penting yang harusnya diungkapkan

2.3 Struktur Corporate Governance

Corporate governance adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan (Prawinandi dkk., 2012). Effendi (2016:2) mendefinisikan *corporate governance* sebagai suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola resiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnisnya melalui pengalaman aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi pemegang saham dalam jangka panjang. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa struktur *corporate governance* merupakan suatu susunan organ di dalam perusahaan yang menjalankan fungsi tata kelola sebagai pengawas dan pihak yang menjalankan perusahaan.

2.3.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 ayat 6 menjelaskan dewan komisaris adalah sebagai berikut : “Dewan Komisaris adalah organ yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi”. Komite Kebijakan Nasional Governance (KNKG) (2006) mendefinisikan dewan komisaris adalah sebagai berikut : “Dewan Komisaris adalah bagian dari organ perusahaan yang bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG, Namun demikian, dewan komisaris tidak boleh turut serta dalam mengambil keputusan operasional”. Sedangkan menurut Sembiring (2015) ukuran dewan komisaris adalah sebagai berikut : “Ukuran dewan komisaris adalah jumlah seluruh anggota dewan komisaris dalam suatu perusahaan”.

2.3.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris Independen menurut Agoes dan Ardana (2014) adalah sebagai berikut : “Komisaris dan direktur independen adalah seseorang yang ditunjuk untuk mewakili pemegang saham independen (pemegang saham minoritas) dan pihak yang ditunjuk tidak dalam kapasitas mewakili pihak mana pun dan semata-mata ditunjuk berdasarkan latar belakang pengetahuan, pengalaman, dan keahlian profesional yang dimilikinya untuk sepenuhnya menjalankan tugas demi kepentingan perusahaan”. Sedangkan menurut Komite Nasional Kebijakan Governance (2006) komisaris independen sebagai berikut : “Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.” Agoes dan Ardan (2014:110) dewan komisaris

independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan manajemen, pemegang saham, dan anggota dewan komisaris lainnya.

2.3.3 Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Latar belakang pendidikan komisaris utama adalah latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang dimiliki oleh komisaris utama (Suhardjanto dan Afni, 2009). Latar belakang pendidikan ini diukur dengan variabel *dummy*, dimana jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis diberi kode 1, selain ekonomi atau bisnis diberi kode 0 (Suhardjanto dan Miranti, 2009). Ponnu (2012) dalam studinya menyebutkan bahwa seorang anggota dewan komisaris independen perusahaan harus memiliki kredibilitas dan skill serta pengalaman yang diperlukan, sehingga mampu memberikan judgment independen dalam isu yang berkaitan dengan strategi, kinerja, dan sumber daya perusahaan. Dewan komisaris dan direksi harus terdiri dari anggota profesional, dengan keahlian dalam bidang hukum, pajak, atau akuntansi. Keberadaan anggota dewan komisaris independen dan direksi yang memiliki pengalaman dalam industri dan bisnis relevan sangat bermanfaat bagi dewan perusahaan secara keseluruhan. Keberadaan mereka memberikan perspektif mengenai risiko signifikan dan keuntungan kompetitif, serta lebih memahami mengenai tantangan yang akan dihadapi dalam bisnis perusahaan.

2.3.4 Proporsi Komisaris Wanita

Proporsi komisaris wanita adalah perbandingan jumlah anggota komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Nalikka, 2009), dimana ukuran yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Feijoo et al., 2012). Basundari dan Anthana (2013) berpendapat bahwa dalam perspektif bisnis mengenai argumen kesetaraan kesempatan bagi wanita fokus pada fakta bahwa keberadaan wanita dalam dewan perusahaan adalah suboptimal bagi perusahaan. Wanita dianggap sulit untuk memperoleh kursi dalam komisaris dan direksi karena mereka harus

menghadapi berbagai tantangan sehingga apabila wanita berada dalam jajaran dewan perusahaan merupakan suatu kehormatan bagi wanita.

2.3.5 Jumlah Komite Audit

Komite audit adalah sekelompok orang yang dipilih oleh kelompok yang lebih besar untuk mengerjakan pekerjaan tertentu atau untuk melakukan tugas-tugas khusus atau sejumlah anggota Dewan Komisaris perusahaan klien yang bertanggung jawab untuk membantu auditor dalam mempertahankan independensinya dari manajemen." Menurut Arents (2013), menjelaskan pengertian komite audit adalah: "Umumnya komite audit terdiri dari tiga atau lima kadang tujuh orang yang bukan bagian dari manajemen perusahaan. Tujuan dibentuknya komite audit yaitu untuk menjadi penengah antara auditor dan manajemen perusahaan apabila terjadi perselisihan. Komite audit ini merupakan orang yang melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Adanya komite audit diharapkan mampu mengontrol dan memonitor keputusan yang dilakukan manajer itu sudah benar yang berarti bahwa keputusan tidak memihak suatu pihak, namun mengikat semua pihak yang berkepentingan di dalam perusahaan. Komite Audit dituntut dapat bertindak secara independen, independensi komite audit tidak dapat dipisahkan moralitas yang melandasi integritasnya. Hal ini perlu didasari karena komite audit merupakan pihak yang menjembatani antara eksternal auditor dan perusahaan yang juga sekaligus menjembatani antara fungsi pengawasan dewan komisaris dengan internal auditor (Thesarani, 2016).

2.3.6 Jumlah Anggota Dewan Direksi

Direksi mempunyai tanggung jawab menetapkan kebijakan, strategi serta prosedur pengendalian intern, melaksanakan kebijakan dan strategi yang telah disetujui oleh dewan komisaris, memelihara suatu struktur organisasi, memastikan bahwa pendelegasian wewenang berjalan efektif yang didukung oleh penerapan akuntabilitas yang konsisten dan memantau kecukupan dan efektivitas dari sistem pengendalian intern (Sari, 2014). Menurut UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Direksi merupakan Organ Perseroan yang berwenang dan

bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2006:17) menjelaskan bahwa direksi merupakan organ perusahaan bertugas dan bertanggungjawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan serta masing-masing anggota direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya. Ukuran dewan direksi dapat diukur dengan jumlah dewan direksi dalam perusahaan dimana semakin banyak dewan dalam suatu perusahaan akan memberikan suatu bentuk pengawasan terhadap kinerja perusahaan yang semakin lebih baik.

2.3.7 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan para pemegang saham yang juga berarti dalam hal ini sebagai pemilik dalam perusahaan dari pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan yang bersangkutan Downes dan Godman (2011). Kepemilikan Manajerial merupakan saham yang dimiliki oleh manajemen secara pribadi maupun saham yang dimiliki oleh anak cabang. Perusahaan bersangkutan beserta afiliasinya. Kepemilikan manajemen diukur menggunakan skala rasio melalui presentase jumlah saham yang dimiliki manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang beredar Susiana dan Herawaty (2010). Kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi *agency cost* karena dengan memiliki saham perusahaan, diharapkan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi dari kepemilikan saham. Salah satu cara bagi manajer untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan secara sukarela secara lebih luas dalam laporan tahunan, strategi bisnis manajemen dan kinerja perusahaan dengan lebih lengkap, termasuk kinerja lingkungan guna pengambilan keputusan. Untuk itu, semakin besar

kepemilikan manajerial terhadap perusahaan maka informasi yang diungkapkan semakin tinggi termasuk informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai Jumlah dewan komisaris, kepemilikan manajerial, proporsi komisaris independen, latar belakang komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit telah banyak dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya. berikut ini adalah tabel yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan *Mandatory Disclosure* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

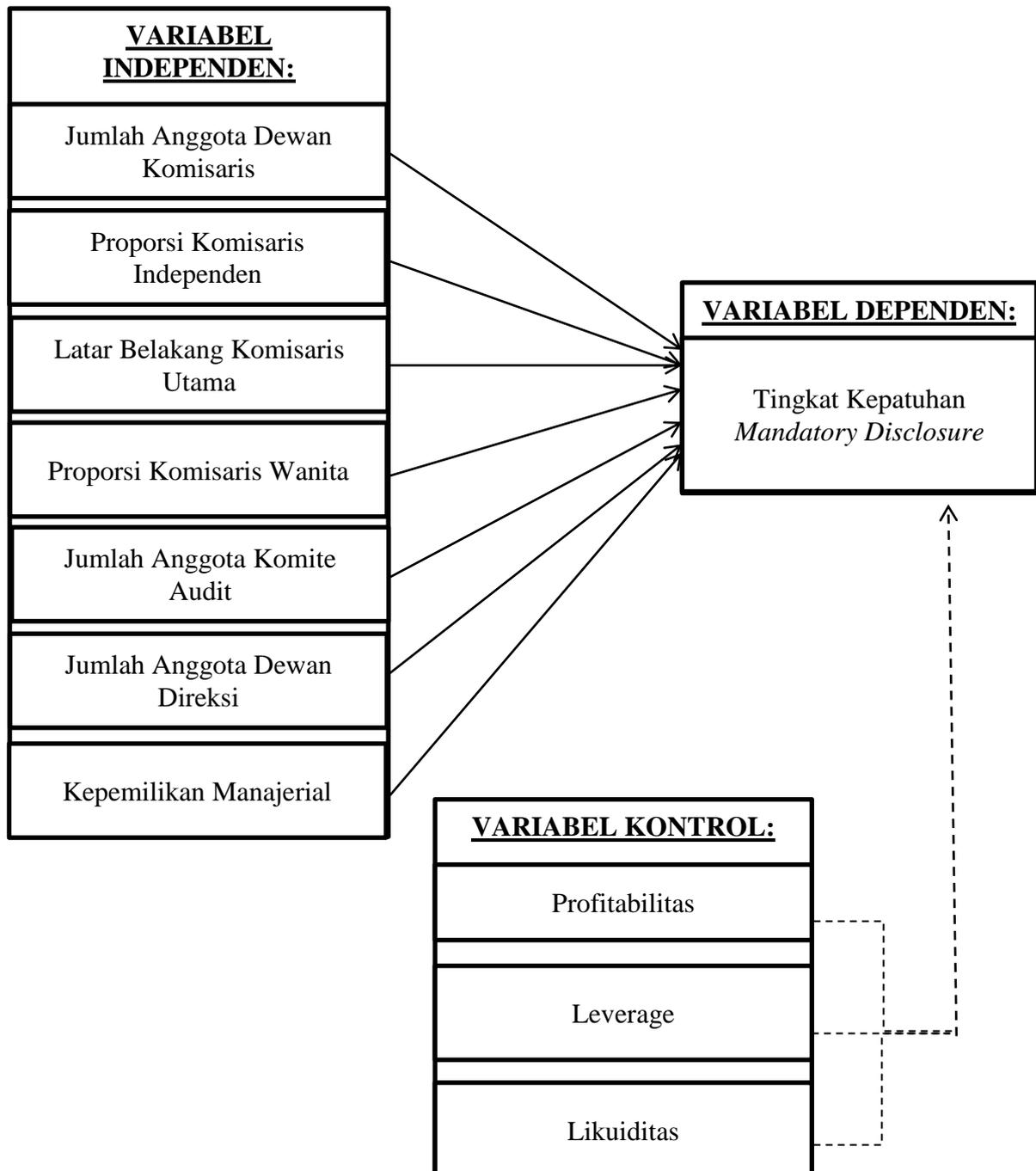
Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Al akra et al., (2010)	Pengaruh regulasi pengungkapan akuntansi, reformasi tata kelola dan perubahan kepemilikan akibat privatisasi kepatuhan pengungkapan wajib	Variabel <i>corporate governance</i> yang dipresentasikan dengan direktur non eksekutif, mandat komite audit, dan ukuran dewan komisaris, struktur kepemilikan.
2	Warda Prawinandi (2012)	Peranr struktur <i>corporate governance</i> dalam tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS Indonesia	Variabel <i>corporate governance</i> yang di presentasikan meneliti tentang tingkat pengungkapan konvergensi IFRS di perusahaan jasa, serta pengaruh dari struktur <i>corporate governance</i> dengan tingkat kepatuhan pengungkapan.
3	Angita Pitasari	Analisis pengaruh	Variabel <i>corporate</i>

	(2014)	struktur <i>corporate governance</i> terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif	governance bertujuan untuk menganalisis bagaimana struktur <i>corporate governance</i> perusahaan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan konvergensi IFRS pada laporan laba rugi komprehensif.
4	Sutiyok dan Evi Rahmawati (2014)	Pengaruh mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> konvergensi IFRS di perbankan	Variabel <i>corporate governance</i> menunjukkan bahwa jumlah dewan komisaris dan jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan pengungkapan wajib atas konvergensi IFRS.
5	Intan Alvionita dan Salma Taqwa (2015)	Pengaruh struktur kepemilikan dan mekanisme <i>corporate governance</i> terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i>	Variabel proporsi komisaris independen dan jumlah anggota komite audit tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> , sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> .
6	Rahmdhani (2016)	Pengaruh struktur <i>corporate governance</i> terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i> di Indonesia	Variabel struktur <i>corporate governance</i> menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan <i>mandatory disclosure</i>

2.5 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan landasan teori dan rumusan masalah penelitian, maka model kerangka pemikiran dalam penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

2.6 Bangunan Hipotesis

2.6.1 Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Menurut Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, jumlah minimal anggota dewan komisaris adalah 1 orang. Dewan komisaris bertugas untuk mengawasi dan mengevaluasi pembuatan dan pelaksanaan kebijakan perusahaan serta memberi nasihat kepada dewan direksi. Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) menunjukkan bahwa, jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Jumlah anggota dewan komisaris yang besar akan sulit mencapai kesepakatan dalam pengambilan keputusan, di sisi lain dengan jumlah anggota dewan komisaris yang kecil maka fungsi pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris tidak maksimal. Fungsi pengawasan dewan komisaris yang tidak maksimal mengakibatkan tingkat kepatuhan perusahaan untuk mengungkapkan informasi wajib menjadi rendah.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₁ :Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

2.6.2 Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Suhardjanto dan Afni, 2009). Keberadaan komisaris independen telah diatur dalam Kep-305/BEJ/07-2004 yang mengatur agar perusahaan yang listed di bursa mempunyai komisaris independen minimal 30,000% dari jumlah anggota dewan komisaris. Kriteria komisaris independen di Indonesia diambil dari kriteria otoritas bursa efek Australia tentang outside directors, dimana kriteria tersebut menekankan tentang pentingnya independensi dalam dewan komisaris (FCGI, 2001). Dengan makin besarnya proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan ini makin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya

transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Penelitian Cheng dan Courtenay (2004) di Singapura menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian Huafang dan Jianguo (2007) juga menunjukkan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan dalam laporan keuangan.

Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₂ : Proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

2.6.3 Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

KNKG (2006) mengungkapkan bahwa tugas komisaris utama adalah mengkoordinasikan kegiatan dewan komisaris. Jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis, diharapkan koordinasi dewan komisaris menjadi lebih efektif. Suhardjanto dan Afni (2009) menjelaskan bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama akan mempengaruhi keputusan dan masukan yang diberikan kepada dewan direksi. Salah satu keputusan yang dibuat oleh dewan direksi adalah keputusan tentang *mandatory disclosure* yang akan dilakukan oleh perusahaan. Penelitian Suhardjanto dan Afni (2009) di Indonesia menunjukkan bahwa latar belakang pendidikan dewan komisaris merupakan faktor yang menentukan *social disclosure* dalam *annual report* perusahaan. Komisaris utama yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis diharapkan lebih memahami tentang pengelolaan perusahaan dan pengambilan keputusan bisnis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan pengungkapan wajib. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₃: Latar belakang pendidikan komisaris utama berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

2.6.4 Proporsi Komisaris Wanita

Menurut Adams dan Ferreira (2004) komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka. Komisaris wanita juga akan meningkatkan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan pria (Kusumastuti et al., 2007). Penelitian Feijoo et al. (2012) di Australia, Jepang dan UK menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility* (CSR). Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₄: Proporsi komisaris wanita berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

2.6.5 Jumlah Komite Audit

Perusahaan *go public* di Indonesia diwajibkan memiliki komite audit yang bertugas untuk memberi pendapat kepada dewan komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang perlu disampaikan oleh dewan direksi kepada dewan komisaris. Membangun peran komite audit yang efektif tidak dapat terlepas dari kacamata penerapan prinsip GCG secara keseluruhan di suatu perusahaan dimana independensi, transparansi dan *disclosure*, akuntabilitas dan tanggung jawab, serta sikap adil menjadi prinsip dan landasan organisasi perusahaan (Alijoyo, 2003). Jumlah anggota komite audit yang terlalu besar mengakibatkan tugas pengawasan menjadi tidak efektif karena koordinasi dan komunikasi antar anggota sulit terjadi. Penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi et al. (2012) menunjukkan bahwa jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Dalam praktik *corporate*

governance, teori agensi mensyaratkan untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan untuk menghindari konflik diantara pihak yang berkepentingan. Dalam hal ini anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Oleh karena itu, semakin besar jumlah anggota komite audit maka akan semakin mempengaruhi tingkat kepatuhan pengungkapan. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Al Akra et al. (2010) menunjukkan bahwa jumlah komite audit adalah faktor yang berpengaruh positif terhadap kepatuhan pengungkapan wajib. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₃: Jumlah anggota komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

2.6.6 Jumlah Dewan Direksi

Dewan direksi memiliki peran dalam melakukan pengelolaan terhadap perusahaan. Segala aktivitas yang terjadi pada perusahaan merupakan tanggung jawab dewan direksi. Banyaknya jumlah dewan direksi pada suatu perusahaan maka tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan tersebut juga tinggi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diyah (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian selanjutnya yaitu mengenai pengaruh dari variabel jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Menurut hasil penelitian dari Wardani et al, (2012) menyatakan hasil tidak signifikan. Hasil ini didapatkan karena perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia hanya sekedar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga jumlah anggota dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Pengaruh signifikan ini memiliki alasan bahwa dewan direksi dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan termasuk jika terjadi penyimpangan. Hipotesis yang dirumuskan dari uraian di atas yaitu:

H₆: Jumlah anggota dean direksi berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

2.6.7 Kepemilikan Manajerial

Soesetio (2008) kepemilikan saham oleh manajerial dapat digunakan untuk mengurangi agency cost karena dengan memiliki saham perusahaan, diharapkan manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi dari kepemilikan saham. Salah satu cara bagi manajer untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan adalah melalui pengungkapan sukarela secara lebih luas dalam laporan tahunan, strategi bisnis manajemen dan kinerja perusahaan dengan lebih lengkap, termasuk kinerja lingkungan guna pengambilan keputusan. Untuk itu, semakin besar kepemilikan manajerial terhadap perusahaan maka informasi yang diungkapkan semakin tinggi termasuk informasi mengenai kinerja lingkungan perusahaan.

H₇ : kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa annual report dan laporan keuangan. Sumber data ini dapat diperoleh dari situs dimiliki oleh BEI, yaitu www.idx.co.id. Sumber data menjelaskan asal usul data penelitian diperoleh. Sumber data terbagi atas sumber primer dan sumber sekunder (Jogiyanto, 2015). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang akan digunakan adalah laporan keuangan dan tahunan yang disajikan oleh perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun 2015 sampai 2017 yang telah dipublikasikan dan tersedia di database pojok BEI Unisbank serta data *floor announcement* dari BEI yang dapat *download* dari website IDX (*Indonesia Stock Exchange*).

3.2 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, karena data diperoleh secara tidak langsung atau melalui perantara. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi dari sumber data sekunder dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah data yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data yang diperlukan untuk membantu penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data dengan cara menggunakan jurnal-jurnal, buku-buku, serta melihat dan mengambil data-data yang diperoleh dari laporan keuangan yang disampaikan Bursa Efek Indonesia dan dari *floor announcement* dari Bursa Efek Indonesia yang dapat *download* dari website IDX (*Indonesia Stock Exchange*). Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Purposive sampling merupakan pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu sesuai dengan tujuan penelitian.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

3.3.1 Populasi Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi bukan hanya sekedar orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek/subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi.

Sedangkan menurut Namawi dalam Bayu (2015) populasi adalah keseluruhan subyek penelitian yang terdiri dari manusia, benda-benda, hewan, tumbuhan, gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi sebagai sumber. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2017.

3.3.2 Sampel Penelitian

Menurut Sugiyono (2014) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar representatif (mewakili). Objek atau nilai yang akan diteliti didalam sampel disebut unit sampel.

Teknik penarikan sampel yang dilakukan peneliti adalah dengan menggunakan metode purposive sampling. Menurut Juliandi dan Irfan (2013) purposive sampling adalah teknik memilih sampel dari suatu populasi berdasarkan pertimbangan (kriteria) tertentu, baik pertimbangan ahli maupun pertimbangan ilmiah.

Berikut kriteria – kriteria perusahaan manufaktur yang dijadikan sampel:

1. Perusahaan digolongkan sebagai perusahaan manufaktur sesuai dengan kategori yang dikembangkan oleh BEI yang tercantum dalam IDX Fact Book
2. Perusahaan digolongkan sebagai perusahaan yang listing dan ganti sektor selama tahun 2015-2017
3. Perusahaan mempublikasikan annual report dan Laporan Keuangan per 31 Desember secara lengkap.
4. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya selama tahun penelitian sebagai mata uang pelaporan.
5. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam periode penelitian.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.4.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016).

3.4.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Mandatory Disclosure. Checklist Beberapa item dipilih dari checklist tersebut dan disesuaikan dengan PSAK yang berlaku di Indonesia. Identifikasi item pengungkapan dalam penelitian ini berdasarkan checklist item pengungkapan wajib yang diwajibkan berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam-LK melalui keputusan ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan nomor: Kep-347/BL/2012 tanggal 25 juni 2012, yang berjumlah 73 item, Pengukuran dengan teknik scoring seperti yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016). Pengukuran variabel diukur dengan menggunakan teknik scoring, yakni jika item yang perlu

diungkapkan dapat diterapkan dalam perusahaan dan item tersebut diungkapkan oleh perusahaan diberi skor 1, jika item tersebut tidak diungkapkan diberi skor 0, dan jika item tersebut tidak dapat diterapkan dalam perusahaan diberi tanda N/A (Not Applicable).

$$\text{MANDSCORE} = \frac{\text{total klasifikasi item yang diungkapkan}}{\text{total jumlah item}} \times 100\%$$

3.4.2 Variabel Independen

Variabel Independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel independen dalam penelitian ini antara lain :

1. Jumlah Anggota Dewan Komisaris

Jumlah komisaris dalam perusahaan memiliki peranan yang sangat penting terutama digunakan untuk monitoring perusahaan dalam pengambilan keputusan strategis. Dewan komisaris mempunyai pengaruh yang luas terhadap luas pengungkapan GCG karena dewan komisaris merupakan pelaksana tertinggi pada perusahaan (Rahmawati dan Sutiyok 2014). Jumlah anggota dewan komisaris diukur menggunakan jumlah komisaris dari pihak yang terafiliasi (memiliki hubungan, salah satunya pihak internal perusahaan) dan tidak terafiliasi (tidak memiliki hubungan) dengan perusahaan (KNKG, 2006 dalam Prawinandi et al., 2012).

2. Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang bukan merupakan pemegang saham mayoritas dan tidak memiliki hubungan langsung dengan pemegang saham mayoritas atau pemegang saham pengendali. Proporsi komisaris independen dapat diukur dengan membagi jumlah anggota komisaris independen perusahaan dengan jumlah keseluruhan anggota dewan komisaris. (Wahidawati, 2015).

$$PDKI = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Total dewan komisaris dalam perusahaan}} \times 100\%$$

3. Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama

Latar belakang pendidikan komisaris utama adalah latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis yang dimiliki oleh komisaris utama (Suhardjanto dan Afni, 2009). Latar belakang pendidikan ini diukur dengan variabel dummy, dimana jika komisaris utama memiliki latar belakang pendidikan ekonomi atau bisnis diberi kode 1, selain ekonomi atau bisnis diberi kode 0 (Suhardjanto dan Miranti, 2009).

4. Proporsi Komisaris Wanita

Proporsi komisaris wanita adalah perbandingan jumlah anggota komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Nalikka, 2009), dimana ukuran yang digunakan adalah dengan membandingkan jumlah komisaris wanita dengan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Feijoo et al., 2012).

5. Jumlah Anggota Komite Audit

Komite audit adalah komite yang bertugas membantu dewan komisaris untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, struktur pengendalian internal perusahaan dilaksanakan dengan baik, pelaksanaan audit internal maupun eksternal dilaksanakan sesuai dengan standar audit yang berlaku, dan tindak lanjut temuan hasil audit dilaksanakan oleh manajemen (BAPEPAM-LK, 2012). Ukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah jumlah anggota komite audit dalam perusahaan. (Prawinandi et al., 2012).

6. Jumlah Dewan Direksi

Menurut KNKG (2006), direksi adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolegiat dalam mengelola perusahaan dan mengambil keputusan strategis dalam perusahaan. Jumlah anggota dewan

direksi diukur dari banyaknya anggota direksi masing-masing perusahaan, sesuai yang digunakan dalam penelitian Prawinandi et al., (2012).

7. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah situasi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus pemilik atau pemegang saham Faizal (2011). Pengukuran pengaruh kepemilikan manajemen terhadap pengungkapan lingkungan menggunakan persentase saham yang dimiliki manajemen. Rumus untuk menghitung persentase kepemilikan manajerial berdasarkan penelitian (Prawinandi et al., 2012).

$$KM = \frac{\text{jumlah saham yang dimiliki manajer}}{\text{total jumlah saham}} \times 100\%$$

3.4.3 Variabel Kontrol

Menurut Sugiyono (2014) variabel kontrol adalah variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga pengaruh variabel independen terhadap dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Variabel kontrol dalam penelitian ini diantaranya profitabilitas, leverage dan likuiditas.

1. Profitabilitas

Rasio yang digunakan untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan, dan juga memberikan ukuran tingkat efektifitas manajemen suatu perusahaan. Hal ini ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan dari penjualan dan pendapatan investasi. Profitabilitas diukur membandingkan pendapatan setelah pajak dengan total ekuitas (Suryani, 2016).

$$\text{Profitabilitas} = \frac{\text{Laba Setelah Pajak}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

2. Leverage

Leverage merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauhmana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivanya. (Suryani, 2016).

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Ekuitas}} \times 100\%$$

3. Likuiditas

Likuiditas adalah rasio untuk mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya (utang dalam hal ini merupakan kewajiban perusahaan)". (Suryani, 2016).

$$\text{Likuiditas} = \frac{\text{Aktiva Lancar}}{\text{Hutang Lancar}} \times 100\%$$

3.5 Metode Analisis Data

Keseluruhan data yang terkumpul selanjutnya dianalisis untuk dapat memberikan jawaban dari masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan program *SPSS for Windows versi 20* untuk mengolah data. Penelitian ini menggunakan metode analisis data sebagai berikut :

3.6 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif adalah statistik yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi. Penjelasan kelompok melalui modus, median, mean, dan variasi kelompok melalui rentang dan simpangan baku. (Ghozali; 2015).

3.7 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik adalah model regresi linier yang dapat disebut sebagai model yang baik jika model tersebut memenuhi beberapa asumsi.(Ghozali, 2015).

3.7.1 Uji Normalitas Data

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah nilai residual yang dihasilkan dari regresi terdistribusi secara normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Beberapa metode uji normalitas yaitu dengan melihat penyebaran data pada sumber dialog pada grafik normal P-P *Plot of Regression Standardized Residual* atau dengan uji *One Sampel Kolmogorov Smirnov*. Sebagai dasar pengambilan keputusan uji normalitas dengan metode grafik yaitu dengan melihat penyebaran titik-titik sekitar garis, jika titik tersebut mengikuti garis diagonal maka nilai residual tersebut telah normal. Sedangkan yang menggunakan uji *One Kolmogorov Smirnov* (Ghozali, 2015). kriteria pengambilan keputusannya yaitu :

- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $\geq 0,05$ data berdistribusi normal
- Jika nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* $\leq 0,05$ data tidak berdistribusi normal

3.7.2 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah keadaan dimana pada model regresi ditemukan adanya korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna antar variable independen. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi yang sempurna atau mendekati sempurna diantara variable bebas (korelasi 1 atau mendekati 1). (Ghozali, 2015). Pada penelitian ini uji multikolinearitas menggunakan nilai *Tolerance* dan *Inflation Faktor (VIF)* pada model regresi. Pengambilan keputusan pada uji multikolinieritas adalah sebagai berikut :

- *Tolerance value* $< 0,10$ atau *VIF* > 10 maka terjadi multikolinearitas
- *Tolerance value* $> 0,10$ atau *VIF* < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas

3.7.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi adalah keadaan dimana pada model regresi ada korelasi antara residual pada periode t dengan residual pada periode sebelumnya ($t-1$). Model regresi yang baik adalah yang tidak terdapat masalah autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test). (Ghozali, 2015). Pengambilan keputusan pada uji Durbin Watson adalah sebagai berikut :

- $DU < DW < 4-DU$ maka H_0 diterima, artinya tidak terjadi autokorelasi positif maupun negatif.

3.7.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2015). Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. (Priyanto, 2012).

3.8 Pengujian Hipotesis

3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda adalah analisis untuk mengetahui besarnya pengaruh antara dua atau lebih variable independen terhadap satu variable dependen dan memprediksi variable dependen dengan menggunakan variable independen. Dalam regresi linier berganda terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi, yaitu residual terdistribusi normal, tidak adanya multikolinearitas, tidak adanya heteroskedastisitas dan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. (Ghozali, 2015).

Model Penelitian regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = B_0 + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + B_5X_5 + B_6X_6 + B_7X_7 + B_8X_8 + B_9X_9 + B_{10}X_{10} + e$$

Keterangan:

Y	: Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS
B ₀	: Konstanta,
B ₁ – B ₉	: Konstanta Variabel,
X ₁	: Jumlah Anggota Dewan Komisaris,
X ₂	: Proporsi Komisaris Independen,
X ₃	: Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama
X ₄	: Proporsi Komisaris Wanita
X ₅	: Jumlah Anggota Komite Audit,
X ₆	: Jumlah Anggota Dewan Direksi
X ₇	: Kepemilikan Manajerial
X ₈	: Profitabilitas,
X ₉	: Leverage
X ₁₀	: Likuiditas
e	: Error

3.8.2 Uji Koefisien Determinasi (Uji R²)

Pengujian Koefisien Determinan (Uji R²) bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen. Koefisien ini menunjukkan seberapa besar variasi variabel independen yang digunakan dalam model mampu menjelaskan variasi variabel dependen. (Ghozali, 2015). Tingkat ketetapan regresi dinyatakan dalam koefisien determinan majemuk (R²) yang nilainya antara 0 sampai dengan 1. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang

dibutuhkan untuk memprediksi variasi variable independen. Sebaliknya, jika nilai yang diperoleh adalah 0 maka variable independen tidak memberikan pengaruh terhadap variable dependen. (Ghozali, 2015).

3.8.3 Uji F (F – Test)

Uji F digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan sudah layak yang menyatakan bahwa variable independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variable dependen. Ketentuan yang digunakan dalam uji F adalah sebagai berikut : (Ghozali, 2015).

1. Jika F hitung lebih besar dari F tabel atau probabilitas lebih kecil dari tingkat signifikansi ($\text{Sig} < 0,05$), maka model penelitian dapat digunakan atau model penelitian tersebut sudah layak.
2. Jika uji F hitung lebih kecil dari F tabel atau probabilitas lebih besar daripada tingkat signifikansi ($\text{Sig} > 0,05$), maka model penelitian tidak dapat digunakan atau model tersebut tidak layak.
3. Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F menurut tabel. Jika nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F tabel, maka model penelitian sudah layak.

3.8.4 Uji T (T – Test)

Uji t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individual (parsial) dalam menerangkan variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut : (Ghozali, 2015).

1. Pada uji ini, suatu variabel independen merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel dependen.
2. Jika probabilitas signifikansinya dibawah 5 %.
3. Jika t hitung $>$ t tabel, H_0 diterima. Dan Jika t hitung $<$ t tabel, H_0 ditolak.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh melalui Bursa Efek Indonesia yang diakses langsung ke www.idx.co.id. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang go publik di Bursa Efek Indonesia pada periode tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Pemilihan sampel pada tahun 2010 didasarkan karena pada tahun tersebut dilakukan proses pengadopsian IFRS ke PSAK, persiapan infrastruktur yang diperlukan dan evaluasi terhadap PSAK yang berlaku. Sampel dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling* adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Seleksi Sampel dengan Kriteria

Kriteria	Jumlah
1. Perusahaan digolongkan sebagai perusahaan manufaktur sesuai dengan kategori yang dikembangkan oleh BEI yang tercantum dalam <i>IDX Fact Book</i>	157
2. Perusahaan digolongkan sebagai perusahaan yang listing dan ganti sektor selama tahun 2015-2017	(6)
3. Perusahaan mempublikasikan <i>annual report</i> dan Laporan Keuangan per 31 Desember secara lengkap	(16)
4. Perusahaan yang menggunakan satuan nilai rupiah dalam laporan keuangannya selama tahun penelitian sebagai mata uang pelaporan	(29)
5. Perusahaan memiliki data yang lengkap terkait dengan variabel-variabel yang digunakan dalam periode penelitian	(89)
Jumlah Perusahaan Manufaktur Yang di Jadikan Sampel	17 (17 x 3) 51

Sumber: Olah Sendiri

4.1.2 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan pencandraan atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, *sum*, *range*, kurtosis. Berikut nilai statistik deskriptif.

Tabel 4.2
Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JDK	51	2	6	4,04	,916
PKI	51	,0000	,7500	,381000	,1584025
LBP KU	51	0	1	,73	,451
PKW	51	,2000	,8000	,351304	,1682582
JKA	51	2	3	2,80	,401
JDD	51	2	11	4,39	2,263
KMJ	51	,0000	,6190	,129294	,1432997
PROF	51	-,2463	,3734	,085955	,1406514
LEV	51	,1872	9,1293	1,462633	1,4751392
LIK	51	,0473	7,2947	2,080661	1,5690012
MANDATORY	51	,4930	,7260	,614118	,0650362
Valid N (listwise)	51				

Sumber: Output SPSS 20

Berdasarkan Tabel 4.2 diatas, dapat dijelaskan informasi tentang gambaran data yang digunakan dalam penelitian ini. Dari 51 data tersebut dapat diketahui bahwa:

1. Nilai minimum dari jumlah anggota dewan komisaris adalah 2 sedangkan nilai maksimum didapat 6. Rata-rata yang dimiliki yaitu dinilai 4,04 dan standar deviasinya 0,916. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
2. Sedangkan nilai minimum dari Proporsi Komisaris Independen sebesar 0,000 nilai maksimum sebesar 0,750. Nilai rata-rata sebesar 0,381 dan

standar deviasi 0,158. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.

3. Sedangkan nilai minimum dari latar belakang pendidikan komisaris utama sebesar 0 dan nilai maksimum 1. Nilai rata-rata sebesar 0,73 dan standar deviasi 0,451. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
4. Sedangkan nilai minimum dari proporsi komisaris wanita 0,200 dan nilai maksimum 8,00. Nilai rata-rata sebesar 0,351 dan standar deviasi 0,1682. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
5. Sedangkan nilai minimum dari jumlah komite audit sebesar 2 dan nilai maksimum 3. Nilai rata-rata sebesar 2,80 dan standar deviasi 0,401. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
6. Sedangkan jumlah anggota dewan direksi mempunyai nilai minimum sebesar 2 dan nilai maksimum sebesar 11 dengan nilai rata – rata sebesar 4,39 dan nilai standar deviasi sebesar 2,263. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
7. Sedangkan kepemilikan manjerial mempunyai nilai minimum sebesar 0,000 dan nilai maximum sebesar 0,6190 dengan nilai rata – rata sebesar 0,129 dan standar deviasi sebesar 0,143. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
8. Sedangkan profitabilitas mempunyai nilai minimum sebesar -0,2463 dan nilai maksimum sebesar 0,3724 dengan nilai rata – rata sebesar 0,085 dan nilai standar deviasi sebesar 0,140. Variabel penelitian menunjukkan bahwa

nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.

9. Sedangkan leverage mempunyai nilai minimum sebesar 0,1872 dan nilai maksimum sebesar 9,129 dengan nilai rata – rata sebesar 1,4234 dan nilai standar deviasi sebesar 1,477. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
10. Sedangkan likuiditas mempunyai nilai minimum sebesar 0,8545 dan nilai maksimum sebesar 7,294 dengan nilai rata – rata sebesar 2,001 dan nilai standar deviasi sebesar 1,5492. Variabel penelitian menunjukkan bahwa nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-rata artinya bahwa data variabel penelitian mengindikasikan hasil yang baik.
11. Sedangkan *Mandatory Disclosure* mempunyai nilai minimum sebesar 0,493 dan nilai maksimum sebesar 0,726 dengan nilai rata – rata *Mandatory Disclosure* sebesar 0,614 dan nilai standar deviasi sebesar 0,0650. Hal Itu berarti *Mandatory Disclosure* cenderung meningkat jika di liat dari nilai rata – rata yaitu 0,6139.

4.2 Asumsi Klasik

4.2.1 Uji Normalitas Data

Menurut Ghazali (2015) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel residual memiliki distribusi normal. Pengujian normalitas data secara analisis dapat dilakukan dengan menggunakan uji *Kolmogrov-Smirnov*. Jika tingkatan probabilitas signifikan pada 0,05 berarti H_0 ditolak yang dapat diartikan data residual berdistribusi tidak normal. Sebaliknya, jika tingkat probabilitas signifikan lebih dari 0,05 data berdistribusi normal (Imam Ghazali, 2015)..

Tabel 4.3
Uji Normalitas Data

		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,04190873
	Absolute	,150
Most Extreme Differences	Positive	,150
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		1,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,199

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Sumber : data diolah SPSS v20

Pada hasil uji statistic non-parametrik *Kolmogorov-Smirnov (K-S)* dapat dilihat bahwa nilai *Kolmogorov-Smirnov*se besar 1,074 dan nilai *Asymp.Sig. (2-tailed)* pada semua variabel dependen maupun independen sebesar 0,199. Dari hasil tersebut terlihat bahwa nilai signifikan dengan uji *one sampel Kolmogorov - smirnov* untuk semua variabel lebih besar dari 0.05, sehingga dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal dan penelitian dapat dilanjutkan dengan menggunakan alat uji parametik (Ghozali, 2015).

4.2.2 Uji Multikolinieritas

Uji Multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Selain itu, keberadaan multikolinearitas dapat dideteksi dengan melihat nilai tolerance dan nilai Variance Inflation Factor (VIF). Jika suatu model mempunyai nilai tolerance < 0,10 atau nilai VIF lebih besar dari 10 maka mengidentifikasi bahwa model tersebut terdapat multikolinearitas (Ghozali, 2015).

Tabel 4.4
Uji Multikolinieritas

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
JDK	,761	1,314
PKI	,830	1,205
LBP KU	,818	1,223
PKW	,792	1,262
JKA	,845	1,184
JDD	,677	1,476
KMJ	,690	1,448
PROF	,649	1,541
LEV	,759	1,317
LIK	,689	1,450

a. Dependent Variable: MANDATORY

Sumber : data diolah SPSS v20

Berdasarkan uji multikolinieritas diatas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai tolerance menunjukkan bahwa variabel – variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,1 yang berarti bahwa korelasi antara variabel bebas tersebut nilainya kurang dari 100%. Dan hasil dari perhitungan *varian inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa variabel – variabel independen memiliki nilai VIF kurang dari 10 yaitu sebesar). Dimana jika nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10, maka tidak terdapat korelasi antara variabel bebas atau tidak terjadi multikolinieritas (Imam Ghozali, 2015).

4.2.3 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya) (Imam Ghozali, 2015).

Tabel 4.5
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,765 ^a	,585	,481	,0468554	2,171

a. Predictors: (Constant), LIK, JDK, LBPKU, PKI, JKA, PKW, KMJ, LEV, JDD, PROF

b. Dependent Variable: MANDATORY

Sumber : data diolah SPSS v20

Nilai DW sebesar 2,171 nilai ini jika dibandingkan dengan nilai table dengan menggunakan derajat kepercayaan 5% dengan jumlah sampel sebanyak 51 serta jumlah variabel independent (K) sebanyak 10 maka ditabel durbin Watson akan didapat nilai dl sebesar 1,1678 du sebesar 1,9799. Dapat di ambil kesimpulan bahwa: $du \leq dw \leq 4-du$, yang artinya nilai dw (2,171) lebih besar dari nilai du (1,9799) dan nilai dw (2,171) lebih kecil dari nilai 4-du (2,201). Maka dapat di ambil keputusan tidak ada autokorelasi positif pada model regresi tersebut.

4.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Untuk mendeteksi ada tidaknya gejala heteroskedastisitas (Ghozali, 2015). Uji Glejser dilakukan dengan cara meregresikan antara variabel independen dengan nilai absolut residualnya. Jika nilai signifikansi antara variabel independen dengan absolut residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Jika nilai signifikan antara variabel independen dengan absolute residual lebih dari 0,05 maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. (Priyanto, 2012).

Tabel 4.6
Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,106	,027		3,929	,000
JDK	-,005	,003	-,206	-1,497	,142
PKI	,007	,017	,054	,411	,683
LBP KU	-,022	,006	-,474	-3,569	,001
PKW	-,043	,017	-,352	-2,608	,013
JKA	-,002	,007	-,035	-,265	,793
JDD	-,002	,001	-,270	-1,853	,071
KMJ	-,005	,021	-,037	-,253	,802
PROF	,055	,022	,373	2,498	,017
LEV	-,001	,002	-,087	-,632	,531
LIK	-,004	,002	-,338	-2,336	,025

a. Dependent Variable: RES_2

Sumber : data diolah SPSS v20

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas melalui uji Glejser pada tabel 4.6, dapat dilihat bahwa sig. pada semua variabel jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, jumlah anggota dewan direksi, kepemilikan manajerial profitabilitas, leverage, bernilai lebih besar dari 0,05 dan variabel – variabel tersebut dapat dinyatakan tidak mengalami heteroskedastisitas. Sedangkan variabel latar belakang pendidikan, proporsi komisaris wanita, profitabilitas dan likuiditas bernilai lebih kecil dari 0,05 dan variabel – variabel tersebut dapat dinyatakan mengalami heteroskedastisitas

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji Regresi Berganda

Pengujian regresi berganda digunakan untuk meramalkan atau mengetahui apakah variabel independen jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, jumlah anggota dewan direksi, kepemilikan

manajerial profitabilitas, leverage dan likuiditas mempengaruhi variable dependen yaitu mandatory disclosure.

Tabel 4.7
Uji Regresi Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,368	,072		5,106	,000
JDK	,020	,008	,275	2,359	,023
PKI	,225	,046	,547	4,894	,000
LBP KU	-,016	,016	-,111	-,982	,332
PKW	-,097	,044	-,251	-2,194	,034
JKA	,049	,018	,299	2,701	,010
JDD	,009	,004	,305	2,461	,018
KMJ	-,201	,056	-,443	-3,614	,001
PROF	-,237	,058	-,513	-4,056	,000
LEV	-,016	,005	-,356	-3,043	,004
LIK	,010	,005	,249	2,032	,049

a. Dependent Variable: MANDATORY

Sumber : data diolah SPSS v20

$$\text{Mandatory} = 0,368 + 0,020X_1 + 0,225X_2 - 0,016X_3 - 0,097X_4 + 0,049X_5 + 0,009X_6 - 0,201X_7 - 0,237X_8 - 0,016X_9 + 0,010X_{10}$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas terlihat bahwa:

1. Apabila nilai semua variabel jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_8, X_9, X_{10} = 0$) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah 0,368.
2. Apabila nilai variabel jumlah anggota dewan komisaris (X_1) dinaikan sebanyak 1x dengan variabel latar belakang pendidikan komisaris utama,

proporsi komisaris wanita, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas, likuiditas bersifat konstan (X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 = 0) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar 0,020.

3. Apabila nilai variabel proporsi komisaris independen (X2) dinaikan sebanyak 1x dengan jumlah dewan komisaris, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah anggota dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas bersifat konstan (X1, X3, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 = 0) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar 0,225.
4. Apabila nilai variabel latar belakang pendidikan komisaris utama (X3) dinaikan sebanyak 1x dengan jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas bersifat konstan (X1, X2, X4, X5, X6, X7, X8, X9, X10 = 0) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar -0,016.
5. Apabila nilai variabel proporsi komisaris wanita (X4) dinaikan sebanyak 1x dengan jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas bersifat konstan (X1, X2, X3, X5, X6, X7, X8, X9, X10 = 0) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar -0,097.
6. Apabila nilai jumlah komite audit, (X5) dinaikan sebanyak 1x dengan jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas bersifat konstan (X1, X2, X3, X4, X6, X7, X8, X9 = 0) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar 0,049.
7. Apabila nilai variabel jumlah dewan direksi (X6) dinaikan sebanyak 1x dengan jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah komite audit, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi

komisaris wanita, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_7, X_8, X_9, X_{10} = 0$) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar 0,009.

8. Apabila nilai variabel kepemilikan manajerial (X_7) dinaikan sebanyak 1x dengan jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_8, X_9, X_{10} = 0$) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar - 0,201.
9. Apabila nilai variabel profitabilitas (X_8) dinaikan sebanyak 1x jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, leverage, likuiditas, bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_9, X_{10} = 0$) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar - 0,237.
10. Apabila nilai variabel leverage (X_9) dinaikan sebanyak 1x jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, likuiditas, bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_9, X_{10} = 0$) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar - 0,016.
11. Apabila nilai variabel likuiditas (X_{10}) dinaikan sebanyak 1x jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, bersifat konstan ($X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6, X_7, X_9, X_{10} = 0$) Maka *Mandatory Disclosure* akan bertambah sebesar 0,010.

4.3.2 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu (Ghozali, 2015).

Tabel 4.7
Uji Determinasi R^2

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,765 ^a	,585	,481	,0468554	2,171

a. Predictors: (Constant), LIK, JDK, LBPKU, PKI, JKA, PKW, KMJ, LEV, JDD, PROF

b. Dependent Variable: MANDATORY

Sumber : data diolah SPSS v20

Hasil perhitungan dengan menggunakan program SPSS versi 20 dapat diketahui bahwa koefisien determinasi (R^2) yang diperoleh sebesar 0,481. Hal ini berarti 48,1% mandatory dapat dijelaskan oleh jumlah dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, profitabilitas, leverage, likuiditas. Sedangkan sisanya yaitu 51,9% harga saham dipengaruhi atau dapat dijelaskan oleh variabel-variabel lainnya.

4.3.3 Uji F

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji F pada tingkat kepercayaan 95% atau α sebesar 0,05 dari hasil output SPSS yang diperoleh, apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ Maka model dinyatakan layak digunakan dalam penelitian ini dan sebaliknya apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, Maka Model dikatakan tidak layak, atau dengan signifikan (Sig) $< 0,05$.

Tabel 4.8
Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	,124	10	,012	5,633	,000 ^b
Residual	,088	40	,002		
Total	,211	50			

a. Dependent Variable: MANDATORY

b. Predictors: (Constant), LIK, JDK, LBPKU, PKI, JKA, PKW, KMJ, LEV, JDD, PROF

Sumber : data diolah SPSS v20

Dari tabel tersebut terlihat bahwa Fhitung sebesar 5,633 sedangkan Ftabel diperoleh melalui tabel F ($Dk = k-1$, $Df: n-k-1$) sehingga $Dk: 10-1 = 8$ $Df: 51-10-1 = 40$, maka diperoleh nilai Ftabel sebesar 2,030 artinya $Fhitung > Ftabel$ ($5,059 > 2,030$) dan tingkat signifikan p- value $< 0,05$ ($0,000 < 0,050$), dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, model diterima dan penelitian dapat diteruskan ke penelitian selanjutnya.

4.3.4 Uji T

Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji T pada tingkat kepercayaan 95% atau α sebesar 0,05 dari hasil output SPSS yang diperoleh, apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$, Maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$, Maka H_0 diterima dan H_a ditolak, atau dengan signifikan (Sig) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima dan sebaliknya apabila signifikan (Sig) $> 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak.

Tabel 4.9
Uji T

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,368	,072		5,106	,000
JDK	,020	,008	,275	2,359	,023
PKI	,225	,046	,547	4,894	,000
LBP KU	-,016	,016	-,111	-,982	,332
PKW	-,097	,044	-,251	-2,194	,034
JKA	,049	,018	,299	2,701	,010
JDD	,009	,004	,305	2,461	,018
KMJ	-,201	,056	-,443	-3,614	,001
PROF	-,237	,058	-,513	-4,056	,000
LEV	-,016	,005	-,356	-3,043	,004
LIK	,010	,005	,249	2,032	,049

a. Dependent Variable: MANDATORY

Sumber : data diolah SPSS v20

Dari tabel tersebut terlihat bahwa terdapat t_{hitung} untuk setiap variabel sedangkan t_{tabel} diperoleh melalui tabel T (α : 0.05 dan df: n-9) sehingga α : 0.05 dan Df: 51-10 = 41 maka diperoleh nilai t_{tabel} sebesar 1,659. Maka dapat di ambil kesimpulan setiap variabel adalah sebagai berikut:

- Variabel Jumlah Anggota Dewan komisaris (X1) nilai t_{hitung} sebesar 2,359 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,359 > 1,659$) dan tingkat signifikan sebesar $0,023 < 0,05$, yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh Jumlah Anggota Dewan komisaris terhadap *Mandatory Disclosure*.
- Variabel Proporsi Komisaris Independen (X2) nilai t_{hitung} sebesar 4,894 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,894 > 1,659$) dan tingkat signifikan sebesar $0,000 < 0,05$, yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh Proporsi komisaris independen terhadap *Mandatory Disclosure*.
- Variabel Latar Belakang Pendidikan (X3) nilai t_{hitung} sebesar $-0,982$ yang artinya bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,984 < 1,659$) dan tingkat signifikan sebesar

0,332 > 0,05, yang bermakna bahwa H_0 diterima dan H_a ditolak maka tidak ada pengaruh latar belakang pendidikan terhadap *Mandatory Disclosure*.

- d) Variabel Proporsi Komisaris Wanita (X4) nilai t_{hitung} sebesar - 2,194 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,194 > 1,659) dan tingkat signifikan sebesar 0,034 < 0,05, yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh Proporsi komisaris wanita terhadap *Mandatory Disclosure*.
- e) Variabel Jumlah Komite Audit (X5) nilai t_{hitung} sebesar 2,701 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,701 > 1,659) dan tingkat signifikan sebesar 0,010 < 0,05, yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh jumlah komite audit terhadap *Mandatory Disclosure*.
- f) Variabel Jumlah Dewan Direksi (X6) nilai t_{hitung} sebesar 2,461 yang artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,461 > 1,659) dan tingkat signifikan sebesar 0,018 < 0,05 yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada ada pengaruh jumlah dewan direksi terhadap *Mandatory Disclosure*.
- g) Variabel Kepemilikan Manajerial (X7) nilai t_{hitung} sebesar - 3,614 artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (3,614 > 1,659) dan tingkat signifikan sebesar 0,001 < 0,05 yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada Kepemilikan Manajerial terhadap *Mandatory Disclosure*
- h) Variabel profitabilitas (X8) nilai t_{hitung} sebesar - 4,056 artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,056 > 1,659) dan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05 yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh profitabilitas terhadap *Mandatory Disclosure*.
- i) Variabel Leverage (X9) nilai t_{hitung} sebesar - 3,043 artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (4,043 > 1,659) dan tingkat signifikan sebesar 0,004 < 0,05 yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh Leverage terhadap *Mandatory Disclosure*.
- j) Variabel likuiditas (X8) nilai t_{hitung} sebesar 2,032 artinya bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ (2,032 > 1,659) dan tingkat signifikan sebesar 0,049 < 0,05 yang bermakna bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima maka ada pengaruh likuiditas terhadap *Mandatory Disclosure*.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa jumlah anggota komisaris berpengaruh terhadap *Mandatory Disclosure*. Hal ini membuktikan karena seringkali seorang atau lebih dari komisaris melakukan dominasi atas jalannya rapat yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, hal tersebut membuat rapat dewan komisaris kurang efektif sehingga tidak dapat mendorong manajemen untuk melakukan *Mandatory Disclosure*. Jumlah anggota dewan komisaris tidak berkorelasi signifikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* karena total anggota dewan komisaris yang banyak dapat mengakibatkan proses mendapatkan kesepakatan serta pengambilan keputusan menjadi sulit, panjang dan bertele-tele, sedangkan total anggota yang minim menyebabkan dewan komisaris tidak dapat memberikan tekanan kepadadewan direksi (Muntoro, 2005 dalam Prawinandi, dkk 2012) oleh sebab itu tidak dapat memotivasi perusahaan dalam melakukan pengungkapan informasi wajib yang lebih maksimal.

Penelitian ini mendukung Hasil penelitian Supriyono *et al.* (2014), Sutiyo dan Rahmawati (2014), Hafiz *et al.* (2015) dan Gunawan dan Hendrawati (2016) yang menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*, karena mengindikasikan bahwa semakin banyak jumlah anggota dewan komisaris maka semakin besar evaluasi yang dilakukan dewan komisaris terhadap manajemen dalam rangka memperluas pengungkapan (Pitasari dan Septiani, 2014). Akan tetapi tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh Prawinandi, dkk (2012) dan Pitasari dan Septiani (2015).

4.4.2 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel proporsi dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure*. Hal ini mengidentifikasikan bahwa

proporsi yang di tetapkan untuk komisaris dengan ketentuan minimum dewan komisaris independen sebesar 30% belum cukup tinggi untuk membuat komisaris independen tersebut mendominasi kebijakan yang diambil oleh dewan komisaris dalam mengawasi dan mengevaluasi pembuatan kebijakan pembuatan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS. Jika komisaris independen merupakan pihak mayoritas dalam jumlah anggota dewan komisaris (>50%) mungkin dapat lebih efektif dalam memonitor perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen maka proses pengawasan yang dilakukan dewan komisaris tersebut semakin berkualitas dengan makin banyaknya pihak independen dalam perusahaan yang menuntut adanya transparansi dalam pelaporan keuangan perusahaan (Nasution dan Setiawan, 2007). Ada kemungkinan komisaris independen mempunyai fungsi ‘psedo’ (semu) (Suhardjanto, 2008). Keberadaan dewan komisaris independen sematamata untuk memenuhi aturan yang berlaku, tidak disesuaikan dengan kebutuhan dan efektivitas organisasi

Menurut Suhardjanto (2014) independent director lebih efektif dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan daripada non-independent director karena kepentingan mereka tidak terganggu oleh ketergantungan pada organisasi. Menurut Chairina (2015) proporsi komisaris independen berpengaruh pada tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh penelitian Prawidandi dkk (2012) yang menyatakan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS. Akan tetapi berlawanan dengan Suhardjanto dan Permatasari (2010), Akhtarudin (2010) proposi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*.

4.4.3 Pengaruh Latar Belakang Pendidikan Komisaris Utama Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel latar belakang pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Tidak adanya pengaruh

signifikan dari latar belakang pendidikan komisaris utama terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS, diduga karena adanya kemungkinan latar belakang pendidikan komisaris utama pada perusahaan hanya ditujukan untuk komisaris yang berlatar belakang pendidikan ekonomi sehingga mereka tidak bisa mengelola perusahaannya sesuai dengan bidang dan tamatannya masing-masing. Menurut Kusumastuti, et al (2007), dewan komisaris yang memiliki latar pendidikan bisnis dan/atau ekonomi akan memiliki pengetahuan lebih banyak di bidang bisnis dan ekonomi sehingga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk mengelola bisnis dan mengambil keputusan bisnis perusahaan.

Araf koefisien regresi memiliki tanda negatif, artinya semakin banyak dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis dalam jajaran dewan komisaris perusahaan menyebabkan latar belakang pendidikan dewan komisaris tidak bervariasi, sebaliknya semakin sedikit dewan komisaris yang memiliki latar belakang pendidikan ekonomi dan bisnis maka akan semakin bervariasi latar belakang pendidikan anggota dewan komisaris. Hasil ini mendukung teori Resource Dependend Theory yang menyatakan bahwa dengan menggunakan komposisi BOD yang tersebar, akan meningkatkan kualitas pemecahan masalah. Selain itu, kelompok yang heterogen akan cenderung menghasilkan pemecahan masalah yang lebih inovatif karena perbedaan latar belakang pendidikan akan menyebabkan anggota kelompok dapat melihat permasalahan dari berbagai perspektif berdasarkan pengetahuan anggota kelompok. Hal ini menyebabkan akan banyak pilihan alternatif dan menalaah lebih konservatif dalam pengambilan keputusan.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan penelitian Prawinandhi (2012), yang mengemukakan secara statistik bahwa latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS. Hal ini dikarenakan latar belakang pendidikan yang digunakan dalam perusahaan ini hanya ekonomi dan bisnis padahal jika mereka berlatar belakang sesuai bidang industrinya itu lebih baik lagi.

4.4.4 Pengaruh Proporsi Komisaris Wanita Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Proporsi komisaris wanita berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Rahindayati (2015) mengatakan bahwa keberadaan anggota wanita dalam dewan komisaris dan direksi perusahaan merupakan salah satu komponen keberagaman pengurus yang paling sering diteliti. Pada umumnya wanita lebih memiliki pemikiran yang mendetail terkait dalam analisis pengambilan keputusan (Rahindayati, 2015). Wanita dalam dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan terhadap kinerja perusahaan karena pada umumnya wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan dengan pria (Kusumastuti dkk., 2007). Untuk itu dengan semakin banyaknya komisaris wanita dalam jajaran direksi akan lebih meningkatkan kepatuhan dalam mengungkapkan kondisi perusahaan sesuai dengan konvergensi IFRS.

Menurut Adams dan Ferreira (2004) komisaris wanita lebih rajin dalam menghadiri rapat dewan komisaris dibandingkan dengan komisaris pria, dimana kehadiran dalam rapat ini penting karena rapat dewan komisaris merupakan cara agar dewan komisaris memperoleh informasi penting tentang perusahaan sebagai dasar untuk melakukan tugas mereka. Komisaris wanita juga akan meningkatkan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan karena wanita memiliki sikap kehati-hatian yang sangat tinggi, cenderung menghindari risiko, dan lebih teliti dalam melakukan pengawasan dibandingkan pria (Kusumastuti et al., 2007).

Widjayanti dan Wahidawati (2015) menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS. Penelitian Feijoo et al. (2012) di Australia, Jepang dan UK menunjukkan bahwa komisaris wanita berpengaruh terhadap pengungkapan. Sedangkan Gunawan dan Hendrawati (2016) menunjukkan bahwa proporsi komisaris wanita tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS

4.4.5 Pengaruh Jumlah Anggota Komite Audit Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Jumlah anggota komite audit berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*, yang artinya bahwa jumlah komite audit berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*. Dengan demikian, jumlah komite audit mempengaruhi tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*. Hal ini membuktikan bahwa jika jumlah anggota komite audit terlalu besar maka komunikasi dan koordinasi dalam komite audit akan sulit dilakukan sehingga tugas pemeriksaan dan pengawasan yang dilakukan komite audit untuk membantu dewan komisaris menjadi kurang efektif sehingga dapat mendorong manajemen untuk melakukan *Mandatory Disclosure*. Jadi semakin banyak komite audit maka pengawasan terhadap pengungkapan semakin baik sehingga pengungkapan akan semakin baik pula. Hal tersebut dikarenakan komite audit merupakan salah satu unsur yang independen untuk mengawasi pihak-pihak yang akan melakukan pengungkapan. Jumlah anggota komite audit berperan untuk mengawasi manajemen agar mengungkapkan laporan keuangan secara lengkap dan jelas. Menurut Suhardjanto (2014) komite audit dalam melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab yang menyangkut sistem pelaporan keuangan, perlu mengadakan rapat tiga sampai empat kali dalam setahun. Menindikasikan bahwa semakin besar jumlah anggota komite audit akan menyebabkan komunikasi dan koordinasi menjadi sulit sehingga tugas komite audit dalam rangka membantu dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* menjadi lebih efektif.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian oleh Supriyono *et al.* (2014) yang menjelaskan bahwa komite audit berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* IFRS. Menurut Suhardjanto (2014) jumlah komite audit berpengaruh pada tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Hasil penelitian ini tidak didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suhardjanto *et al.* (2012) yang menyatakan bahwa variabel jumlah komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik *risk disclosure*.

4.4.6 Pengaruh Jumlah Anggota Dewan Direksi *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Hasil ini sesuai dengan hipotesis yang telah diajukan yang mengharapkan keberadaan direktur asing akan meningkatkan kinerja pengungkapan wajib suatu perusahaan. Hal ini mengakibatkan keberadaan direktur asing justru menghambat perusahaan. Hasil ini konsisten dengan penelitian Suryono dan Prastiwi (2011). Menurut Wijayanti (2011) tidak ditemukannya hubungan antara dewan direksi dengan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan, dikarenakan adanya hubungan agensi yang memotivasi setiap individu untuk memperoleh sasaran yang harmonis dan menjaga kepentingan masing-masing antara agent dan principal. Hal ini memungkinkan pihak manajemen (direksi) lebih mementingkan kepentingan pemegang saham daripada tujuan perusahaan yang berdampak tidak maksimalnya pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Diyah (2015) menunjukkan bahwa jumlah anggota dewan direksi memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure konvergensi IFRS. Penelitian selanjutnya yaitu mengenai pengaruh dari variabel jumlah anggota dewan direksi terhadap tingkat kepatuhan mandatory disclosure. Menurut hasil penelitian dari Wardani et al, (2012) menyatakan hasil tidak signifikan. Hasil ini didapatkan karena perusahaan-perusahaan publik yang ada di Indonesia hanya sekedar mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan sehingga jumlah anggota dewan direksi tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan wajib yang dilakukan oleh perusahaan. Pengaruh signifikan ini memiliki alasan bahwa dewan direksi dianggap sebagai pihak yang memiliki tanggung jawab atas segala sesuatu yang terjadi pada perusahaan termasuk jika terjadi penyimpangan

Hasil ini berbeda dengan penelitian terdahulu seperti Barka dan Dardour (2015), Ibrahim dan Hanefah (2016) dan Muttakin et al., (2015) yang menunjukkan dampak positif keberadaan direktur asing terhadap *mandatory*. Penelitian ini juga sejalan dengan Fuente et al., (2017) dan Garcia-Sanchez et al., (2014). Ada beberapa argumentasi yang terkait dengan hal ini. Pertama, direktur asing mempunyai kelemahan dalam hal memahami kondisi dan lingkungan di negara

setempat sehingga mereka tidak bisa memberikan dampak positif terhadap perusahaan (Masulis et al., 2012). Kedua, direktur asing mempunyai sudut pandang investasi yang berbeda dengan anggota direksi lainnya, sehingga hal ini akan menimbulkan konflik antara anggota direksi (García-Meca et al., 2015).

4.4.7 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Hal ini menunjukkan bahwa komisaris yang memiliki saham perusahaan memiliki insentif lebih besar untuk melakukan monitoring sehingga akan mengurangi kecurangandalam laporan keuangan (Beasley, 1996). Dan semakin besar kepemilikan manajerial perusahaan maka tingkat monitoring semakin kuat sehingga manajer akan lebih meningkatkan tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*. Hal ini diduga karena berdasarkan hasil pengukuran dapat dilihat bahwa total kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan di Indonesia relatif kecil sehingga belum terdapat keserasian kepentingan antar pemilik dan manajer. Manajer yang memiliki kebebasan yang baik dalam mengakses informasi pihak internal dibandingkan dengan pihak eksternal. Apabila kepemilikan saham perusahaan dominan pada manajerial maka perusahaan tidak akan menyediakan informasi bagi publik karena pihak yang dominan bukan publik tetapi pihak internal perusahaan. Konsentrasi kepemilikan pada pihak manajemen tidak dapat menjamin manajemen untuk melakukan pengungkapan karena tuntutan informasi relatif rendah dibandingkan konsentrasi kepemilikan pihak eksternal (Akhtaruddin, 2008 dalam Alvionita, dkk 2015). Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa adanya kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan tidak dapat menjamin untuk meningkatkan kepatuhan *Mandatory Disclosure*.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian Utami, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure*. Akan tetapi tidak mendukung penelitian Fajriansyah (2013) yang menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* IFRS.

4.4.8 Pengaruh Profitabilitas Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Hal ini dikarenakan dengan tingginya profitabilitas menunjukkan semakin tingginya kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba dan semakin baik kinerja perusahaannya. Dengan laba yang tinggi perusahaan memiliki cukup dana untuk mengumpulkan, mengelompokkan dan mengolah informasi menjadi lebih bermanfaat serta dapat menyajikan pengungkapan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi akan lebih berani mengungkapkan laporan. Dengan demikian semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka akan semakin luas pengungkapan laporan keuangannya. Sebaliknya, semakin kecil profitabilitas maka akan semakin sempit dalam pengungkapan laporan keuangan. Hasil ini mendukung teori keagenan (*agency theory*) dikarenakan dengan signifikannya pengaruh ROA terhadap IW mengindikasikan bahwa kelengkapan pengungkapan laporan keuangan dengan penjelasannya menekankan pada laba yang diperoleh perusahaan. Sehingga penyajian item penghasilan perusahaan disajikan secara normal dengan memperhatikan besarnya perubahan penghasilan yang terjadi.

Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayat (2008) menyatakan, bahwa rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efektif perusahaan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Dengan kata lain profitabilitas adalah hasil bersih dari serangkaian kebijakan dan keputusan perusahaan. Variabel ini dapat mengontrol variabel independen yang lainnya.

4.4.9 Pengaruh Leverage Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel Leverage berpengaruh signifikan terhadap *Mandatory Disclosure*. Hasil penelitian ini sesuai dengan yang diprediksikan yaitu variabel *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib (*Mandatory Disclosure*) yang artinya bahwa semakin

tinggali rasio *leverage* suatu perusahaan atau semakin banyak suatu perusahaan menggunakan hutang dalam struktur permodalannya, maka akan semakin tinggi pula tingkat pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Dalam kondisi seperti itu, *leverage* dipandang sebagai suatu sinyal yang positif bagi manajer suatu perusahaan. Rasio *leverage* menggambarkan sampai sejauh mana aktiva suatu perusahaan dibiayai oleh hutang. Semakin tinggi rasio *leverage* berarti semakin besar pula proporsi pendanaan perusahaan yang dibiayai dari hutang. Apabila semakin banyak proporsi hutang yang digunakan dalam struktur permodalan suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula risiko perusahaan tersebut tidak dapat melunasi hutang-hutangnya sehingga kemungkinan terjadinya kebangkrutan juga akan semakin besar.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) yang menyatakan bahwa *leverage* memiliki pengaruh signifikan terhadap pengungkapan wajib. Perbedaan hasil ini mungkin disebabkan oleh adanya perbedaan dari pemilihan populasi dan tahun penelitian yang diteliti, dan pemilihan indikator dalam menghitung nilai *leverage*. Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2011) menggunakan *Debt to Equity Ratio* untuk menghitung nilai *leverage*, sedangkan penelitian ini menggunakan *Debt to Total Assets Ratio*. Namun hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan Fitriani (2001) dan Rahmawati *et al* (2007). Tetapi tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Almila dan Retrinasari (2007) menyatakan bahwa variabel rasio *leverage* tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel kelengkapan pengungkapan wajib dan sukarela.

4.4.10 Pengaruh Likuiditas Terhadap *Mandatory Disclosure*

Uji hipotesis menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *mandatory disclosure*. Hal ini likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) yang artinya bahwa perusahaan yang kemampuan finansialnya kuat yang ditunjukkan dengan tingkat likuiditas yang tinggi cenderung akan melakukan pengungkapan yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar tingkat likuiditas suatu perusahaan

semakin besar pula tingkat pengungkapan wajib konvergensi IFRS tersebut. Dalam kondisi seperti ini, likuiditas dapat dipandang sebagai kinerja manajemen dalam mengelola perusahaan. Jika likuiditas dipandang sebagai tolak ukur kinerja, perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi perlu melakukan pengungkapan yang lebih luas. Namun perusahaan dengan tingkat likuiditas yang rendah memiliki kewajiban untuk menjelaskan lemahnya kinerja perusahaan tersebut dibandingkan dengan perusahaan lain yang memiliki tingkat likuiditas yang tinggi.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian Permata (2013) yang menunjukkan bahwa hasil likuiditas yang dihitung dengan *current ratio* berpengaruh positif signifikan secara statistik terhadap pengungkapan wajib laporan keuangan. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Fitri (2012) yang menyatakan bahwa Likuiditas (CR) tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan tahunan.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris yaitu faktor – faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS. Variabel utama yang di gunakan dalam penelitian ini terdiri dari 7 proksi *good corporate governance* yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, latar belakang pendidikan komisaris utama, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial, dan 3 proksi rasio keuangan yaitu profitabilitas, leverage, likuiditas. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan manufaktur *go public* yang listing di BEI dengan periode tahun 2015-2017. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan statistik deskriptif, data dan regresi linier berganda dengan tingkat kepercayaan 95%. Maka kesimpulan yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah yaitu jumlah anggota dewan komisaris, proporsi komisaris independen, proporsi komisaris wanita, jumlah komite audit, jumlah dewan direksi, kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*. Sedangkan latar belakang pendidikan komisaris utama tidak berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*. Untuk profitabilitas, leverage dan likuiditas berpengaruh terhadap *mandatory disclosure*.

5.2 Keterbatasan

Adapun keterbatasan pada penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini belum memberikan klasifikasi secara rinci tentang waktu pelaporannya, sehingga hasil temuan ini tidak sampai menganalisis tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS.
2. Penelitian ini hanya mengelompokkan perusahaan berdasarkan jenis industri (manufaktur dan non manufaktur) bukan jenis industri secara spesifik sehingga hasilnya kurang mewakili seluruh jenis industri.

3. Penelitian ini lebih banyak menganalisis pengaruh variabel-variabel internal perusahaan kurang memperhatikan variabel-variabel eksternal perusahaan yang mungkin berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS.

5.3 Saran

Saran yang diajukan untuk penelitian selanjutnya yaitu :

1. Memperpanjang periode penelitian sehingga dapat melihat kecenderungan yang terjadi dalam jangka panjang sehingga akan menggambarkan kondisi yang sesungguhnya terjadi.
2. Mengelompokkan perusahaan ke dalam jenis industri yang lebih spesifik sehingga dapat dilihat lebih jelas, jenis industri apa saja yang lebih banyak menerapkan tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS.
3. Menambah variabel yang berhubungan dengan kondisi eksternal perusahaan, misalnya kondisi ekonomi, penggunaan teknologi informasi baru, dan faktor lain yang berpengaruh terhadap praktik tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS.
4. Melakukan penelitian dengan membandingkan praktik tingkat kepatuhan *Mandatory Disclosure* konvergensi IFRS pada saat ekonomi normal dan pada saat krisis ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, R. dan D. Ferreira. 2004. Gender Diversity in the Boardroom. *ECGI Working Paper Series in Finance*, Stockholm : 1-19.
- Adrian, Sutendi. 2012. *Good Corporate Governance*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Agoes, Sukrisno dan Cenik Ardana. 2014. Etika Bisnis dan Profesi. Jakarta: *Salemba Empat*.
- Al- Ikra, M., I.A., Eddie dan M.J. Ali. 2010. The Influence of the Introduction of Accounting Disclosure Regulation on Mandatory Disclosure Compliance : Evidence from Jordan. *The British Accounting Review* 142 : 170-186.
- Almilia, L.S dan Retnasari, I. 2007. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan Pengungkapan Dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Proceeding Seminar Nasional*.
- Alvionita, I., dan Taqwa, Salma. 2015. Pengaruh Struktur Kepemilikan dan Mekanisme *Corporate Governance* Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi. Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang.
- Anggita Pitasari. 2014. Analisis Pengaruh Struktur Corporate Governance terhadap Komprehensif. *Diponegoro Journal of Accounting*.
- Arens, et.al. 2013. Audit dan Jasa Assurance Pendekatan Terpadu (Adaptasi Indonesia), Jakarta: *Salemba Empat*.
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam). 2012. Kajian Tentang Pedoman Good Corporate governance di Negara-Negara Anggota ACMF. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.

- Beasley, M. 1996. *An Empirical Analysis of the Relation Between The Board of Director Composition and Financial Statment Fraud*. The Accounting Review. Vol.71.PP 443-465.
- Budiasih, 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Struktur Kepemilikan, dan *Profitabilitas* pada Pengungkapan Wajib Laporan Tahunan. *Skripsi*. Universitas Udayana.
- Cheng, E.C.M., dan S.M Courtenay .2004. *Board Composition, Regulatory Regime and Voluntary Disclosure*. *The International Journal of Accounting* 41 (3) : 1-48.
- Downes & Godman.2011. Kamus Istilah Keuangan dan Investasi. Diterjemahkan oleh Susanto Budhidarmo. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Fajariansyah, F.2013. Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Ukuran perusahaan terhadap Tingkat pengungkapan wajib IFRS. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Feijoo, B. F., S. Romero, dan S. Ruiz. 2012. *Does Board Gender Composition Affect Corporate Social Responsibility Reporting International*. *Journal of Business and Social Science* 3 (1): 31-38.
- Forum for Corporate Governance in Indonesia. 2001. Peranan Dewan Komisaris dan Komite Audit dalam Pelaksanaan *Corporate Governance* Seri Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), Jilid II. Edisi 2 Jakarta. <http://fcgi.org.id>. November 2018.
- Effendi, Muh Arief. 2016. *Good Corporate Governance (Teori dan Implementasi)*. Jakarta. Hal : 2.
- Ghozali, Imam. 2015. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19*. Semarang: Universitas Diponegoro.

- Herawaty, Vinola. 2008. Peran Praktek *Corporate Governance* sebagai *Moderating Variabel* dari Pengaruh *Earnings Management* Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 10, No. 2: 1-22.
- Hikmah, N dan D.Rahmayanti, 2014. Faktor-faktor yang mempengaruhi luas pengungkapan *Corporate Governance* dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI. Simposium Nasional Akuntansi XIV.
- Huafang, X., dan Y. Jianguo.2007. *Ownership Structure Board Composition and Corporate Voluntary Disclosure*. *Manajerial Auditing Journal* 22 (6).
- Husin, E.Z. 2008 .51 Tahun IAI & Konvergensi Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia ke International Financial Reporting Standards (IFRS). Majalah Akuntan Indonesia. Edisi No.14/Tahun III/Februari.
- Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) 2016. *Standar Akuntansi Keuangan Revisi 2016*. Salemba Empat. Jakarta.
- Jensen, M. C and Meckling, W.H. 1976. Theory of the Firm : *Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure* . *Journal of Financial Economics*, Oktober, 1976, V. 3, No. 4, pp.305-360.
- Jogiyanto. 2015. Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Yogyakarta.
- Juliandi, Azwar dan Irfan. 2013. Metodologi Penelitian Kuantitatif Untuk Ilmu-Ilmu Bisnis. Bandung: Citapustaka Media Perintis.
- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). 2006. Pedoman Umum *Good Corporate governance* Indonesia.Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Kusumawati, S., Supatmi, dan P. Sastra. 2007. Pengaruh *Board Diversity* Terhadap Nilai Perusahaan dalam Perspektif *Corporate Governance*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 9(2) : 88-98.

- Nasution dan Setiawan, 2007. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia. *Jurnal Simposium Nasional Akuntansi X*.
- Perramon, J., dan O. Amat.2007. *IFRS Introduction And its Effect on Listed Companies in Spain. working paper series* :1-27.
- Poulan, S.Jimry, 2012. Pengaruh *Corporate Governance* Terhadap *Cash Holding* Perusahaan di Indonesia. *Skripsi*, Semarang: Universitas Diponegoro.
- P.Siagan, Sondang. 2012. Teori Motivasi dan Aplikasinya. Jakarta. Rineka Cipta.
- Prawinandi, W., D. Suhardjanto, dan H. Triatmoko.2012. Peran Struktur *Corporate Governance* dalam Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS. Banjarmasin: *Proceeding Simposium Nasional XV*.
- Pratiwi. 2013. Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kelengkapan *Mandatory Disclosure Financial Statetment*. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Rahmawati, I.N, S.Mutmainah dan Haryanto. 2016. Analisa Pengaruh Ukuran Perusahaan, *Likuiditas, Leverage* dan *Profitabilitas* Terhadap *Mandatory Disclosure*. *Jurnal Maksi*, vol.7, No.1, hal.87-103.
- Silviana dan Pratiwi Budiharta. 2017. Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan Penerapan *Good Corporate Governance* Terhadap Tindakan Perataan Laba yang dilakukan oleh Perusahaan yang terdaftar di BEJ. *MODUS Vol.20(2)* : 126-138, Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhardjanto, D., dan A. N. Afni. 2009. Praktik corporate social disclosure di Indonesia. *Jurnal Akuntansi* 8(3): 265-279.

- Suhardjanto, D., dan Miranti, L. 2009. Praktik Penerapan Indonesian Environmental Reporting Index dan Kaitannya Dengan Karakteristik Perusahaan. *JAAI*. Vol. 13. No. 1: 63-67.
- Suryono, Hari dan Andri Prastiwi. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*. Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala.
- Susiana, Arleen Herawati. 2007. Analisis Pengaruh Independensi, Mekanisme *Corporate Governance*, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. Simposium Nasional Akuntansi X.
- Sutedi, Adrian. 2012. *Good Corporate Governance, Edisi 1 Cetakan 2*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutiyok dan Rahmawati, Evi, 2014, Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS di Perbankan, *Jurnal Akuntansi & Investasi* Vol. 15 No.2 Juli 2014.
- Thesarani, Nurul Juita. 2016. Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional dan Komite Audit Terhadap Struktur Modal Perusahaan. Yogyakarta: Universitas Yogyakarta.
- Utami, W.D., D. Suhardjanto, dan S. Hartoko. 2012. Investigasi dalam Konvergensi IFRS di Indonesia : Tingkat Kepatuhan Pengungkapan Wajib dan kaitannya dengan Mekanisme *Corporate Governance*. *Proceeding Sinposium Nasional Akuntansi XV*. Banjarmasin.
- Widjayanti, Wahidawati. 2015. Pengaruh Struktur dan Mekanisme Corporate Governance pada Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure*. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol 4. No 7.
- Yuli Soesetio. 2008. Kepemilikan Manajerial dan Institusional, Kebijakan Dividen, Ukuran Perusahaan, Struktur Aktiva, dan *Profitabilitas* terhadap Kebijakan Hitung. *Jurnal Keuangan dan Perbankan*. 12 (3), 384-398.

<https://akuntansibisnis.files.wordpress.com/2012/11/viii-g-7.pdf>

<https://www.selasar.com>

<https://www.idx.com>

LAMPIRAN A DATA SAMPEL PENELITIAN

Data Nama Perusahaan

NO	Kode	Nama Perusahaan
1	ALMI	Alumindo Light Metal Industry Tbk
2	FASW	Fajar Surya Wisesa Tbk
3	HMSP	Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk
4	INAF	Indofarma (Persero) Tbk
5	ISSP	Steel Pipe Industry of Indonesia Tbk
6	JECC	Jembo Cable Company Tbk
7	KICI	Kotobukiya Indo Classic Industries
8	MBTO	Martina Berto Tbk
9	NIPS	Nipress Tbk
10	PICO	Pelangi Indah Canindo Tbk
11	PRAS	Prima Alloy Steel Universal Tbk
12	PYFA	Pyridam Farma Tbk
13	SSTM	Sunson Textile Manufacturer Tbk
14	SSTP	Secure Socket Tunneling Protocol
15	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk
16	WIIM	Wismilak Inti Makmur Tbk
17	WTON	Wijaya Karya Beton

LAMPIRAN B Uji HIPOTESIS
Descriptives

Hasil Uji Deskriptive

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
JDK	51	2	6	4,04	,916
PKI	51	,0000	,7500	,381000	,1584025
LBP KU	51	0	1	,73	,451
PKW	51	,2000	,8000	,351304	,1682582
JKA	51	2	3	2,80	,401
JDD	51	2	11	4,39	2,263
KMJ	51	,0000	,6190	,129294	,1432997
PROF	51	-,2463	,3734	,085955	,1406514
LEV	51	,1872	9,1293	1,462633	1,4751392
LIK	51	,0473	7,2947	2,080661	1,5690012
MANDATORY	51	,4930	,7260	,614118	,0650362
Valid N (listwise)	51				

NPar Tests

Hasil Uji Normalitas Data

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		51
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7
	Std. Deviation	,04190873
	Absolute	,150
Most Extreme Differences	Positive	,150
	Negative	-,069
Kolmogorov-Smirnov Z		1,074
Asymp. Sig. (2-tailed)		,199

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
JDK	,761	1,314
PKI	,830	1,205
LBP KU	,818	1,223
PKW	,792	1,262
JKA	,845	1,184
JDD	,677	1,476
KMJ	,690	1,448
PROF	,649	1,541
LEV	,759	1,317
LIK	,689	1,450

a. Dependent Variable: MANDATORY

Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,765 ^a	,585	,481	,0468554	2,171

a. Predictors: (Constant), LIK, JDK, LBP KU, PKI, JKA, PKW, KMJ, LEV, JDD, PROF

b. Dependent Variable: MANDATORY

Hasil Uji Heteroskidastisitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,106	,027		3,929	,000
JDK	-,005	,003	-,206	-1,497	,142
PKI	,007	,017	,054	,411	,683
LBP KU	-,022	,006	-,474	-3,569	,001
PKW	-,043	,017	-,352	-2,608	,013
JKA	-,002	,007	-,035	-,265	,793
JDD	-,002	,001	-,270	-1,853	,071
KMJ	-,005	,021	-,037	-,253	,802
PROF	,055	,022	,373	2,498	,017
LEV	-,001	,002	-,087	-,632	,531
LIK	-,004	,002	-,338	-2,336	,025

a. Dependent Variable: RES_2

Hasil Uji Regresi Berganda

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,368	,072		5,106	,000
JDK	,020	,008	,275	2,359	,023
PKI	,225	,046	,547	4,894	,000
LBP KU	-,016	,016	-,111	-,982	,332
PKW	-,097	,044	-,251	-2,194	,034
JKA	,049	,018	,299	2,701	,010
JDD	,009	,004	,305	2,461	,018
KMJ	-,201	,056	-,443	-3,614	,001
PROF	-,237	,058	-,513	-4,056	,000
LEV	-,016	,005	-,356	-3,043	,004
LIK	,010	,005	,249	2,032	,049

Hasil Uji Determinasi R²

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,765 ^a	,585	,481	,0468554	2,171

- a. Predictors: (Constant), LIK, JDK, LBPKU, PKI, JKA, PKW, KMJ, LEV, JDD, PROF
b. Dependent Variable: MANDATORY

Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,124	10	,012	5,633	,000 ^b
	Residual	,088	40	,002		
	Total	,211	50			

- a. Dependent Variable: MANDATORY
b. Predictors: (Constant), LIK, JDK, LBPKU, PKI, JKA, PKW, KMJ, LEV, JDD, PROF

Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	,368	,072		5,106	,000
JDK	,020	,008	,275	2,359	,023
PKI	,225	,046	,547	4,894	,000
LBP KU	-,016	,016	-,111	-,982	,332
PKW	-,097	,044	-,251	-2,194	,034
JKA	,049	,018	,299	2,701	,010
JDD	,009	,004	,305	2,461	,018
KMJ	-,201	,056	-,443	-3,614	,001
PROF	-,237	,058	-,513	-4,056	,000
LEV	-,016	,005	-,356	-3,043	,004
LIK	,010	,005	,249	2,032	,049

a. Dependent Variable: MANDATORY



DARMAJAYA

Yayasan Alfian Husin

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 93 Bandar Lampung 35142 Telp 787214 Fax. 700261 http://darmajaya.ac.id

FORMULIR

BIRO ADMINISTRASI AKADEMIK KEMAHASISWAAN (BAAK)

FORM KONSULTASI/BIMBINGAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR *)

NAMA : RANI HERSANSI
 NIM : 1512120079
 PEMBIMBING I : Nofita Yeni Siregar, SE., M.SAK., Akt., CA
 PEMBIMBING II :
 JUDUL LAPORAN : Peran Struktur Corporate Governance Dalam Tingkat
 Kepatuhan Mandatory Disclosure Implementasi PSAK Berbasis IFRS Indonesia
 WAKTU : s.d (6+2 bulan)

No	HARI/TANGGAL	HASIL KONSULTASI	PARAF
1	29-10-2018	Tanti Judul dan Revisi	<i>[Signature]</i>
2	07-11-2018	Ace Seminar Proposal	<i>[Signature]</i>
3	26/12/18	Perbaiki Penulisan	<i>[Signature]</i>
4	18/1/19	Perbaiki 1/5 Daftar pustaka	<i>[Signature]</i>
5		perbaiki penulisan bab 3	<i>[Signature]</i>
6	4/1/19	perbaiki penulisan bab IV	<i>[Signature]</i>
7		Ace bab IV & V	<i>[Signature]</i>
8	11/1/19	Ace Sidang Skripsi	<i>[Signature]</i>
9		Ace cek plagiarisme	<i>[Signature]</i>
10			

*) Coret yang tidak perlu

Bandar Lampung, 22/1/19
Ketua Jurusan

[Signature]

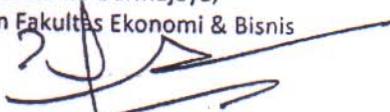
2



SURAT KEPUTUSAN
REKTOR IIB DARMAJAYA
NOMOR : SK.0608/DMJ/DFEB/BAAK/XII-18
Tentang
Dosen Pembimbing Skripsi
Program Studi S1 Akuntansi
REKTOR IIB DARMAJAYA

- Memperhatikan :** 1. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan mutu dan peranan IIB Darmajaya dalam melaksanakan Pendidikan Nasional perlu ditingkatkan kemampuan mahasiswa dalam Skripsi.
2. Laporan dan usulan Ketua Program Studi S1 Akuntansi.
- Menimbang :** 1. Bahwa untuk mengefektifkan tenaga pengajar dalam Skripsi mahasiswa perlu ditetapkan **Dosen Pembimbing Skripsi**.
2. Bahwa untuk maksud tersebut dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat :** 1. UU No.20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2010 tentang Pendidikan Sekolah Tinggi
3. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No.165/D/O/2008 tertanggal 20 Agustus 2008 tentang Perubahan Status STMIK-STIE Darmajaya menjadi Informatics and Business Institute (IBI) Darmajaya
4. STATUTA IBI Darmajaya
5. Surat Ketua Yayasan Pendidikan Alfian Husin No. IM.003/YP-AH/X-08 tentang Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi
6. Surat Keputusan Rektor 0383/DMJ/REK/X-08 tentang Struktur Organisasi.
- Menetapkan Pertama :** Mengangkat nama-nama seperti tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa Program Studi S1 Akuntansi.
- Kedua :** Pembimbing Skripsi berkewajiban melaksanakan tugasnya sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
- Ketiga :** Pembimbing Skripsi yang ditunjuk akan diberikan honorarium yang besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan dan norma penggajian dan honorarium IBI Darmajaya.
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka keputusan ini akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada tanggal : 10 Desember 2018
a.n. Rektor IIB Darmajaya,
Dekan Fakultas Ekonomi & Bisnis


Prof. Ir. Zulkarnain Lubis, M.S., Ph.D
NIK. 14580718

1. Ketua Jurusan S1 Akuntansi
2. Yang bersangkutan
3. Arsip